

TAHUN
2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Gondosuli Nomor 6 Yogyakarta
Telp.: (0274) 588938; Fax: (0274) 563937
Surel: dpkp@jogjaprov.go.id
Laman: dpkp.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY) Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP DPKP DIY Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, DPKP DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2022

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan DIY



Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A.
NIP. 19650525 199103 1 017

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan”:
 - Capaian sasaran diukur dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 9 (sembilan) Program yakni Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Perkebunan, Peningkatan Populasi Peternakan, Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan, Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan, Perlindungan Tanaman Pertanian, Pengembangan Perbenihan Pertanian, serta Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 7.255.205 juta rupiah sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 7.496.829 juta rupiah. Persentase realisasi terhadap target mencapai 103,33%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 7.464.189 juta rupiah terjadi peningkatan sebesar 0,44%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya Ketahanan Pangan”:
 - Capaian sasaran diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program yakni Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 90,82 sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 94,70, dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 104,27%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 kondisinya sama yakni sebesar 94,70, hanya komposisi pola konsumsi per kelompok pangan yang mengalami perubahan.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Pemenuhan Pangan Masyarakat “:
 - Capaian sasaran diukur dengan indikator persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program yakni program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 39,19% sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 40,83%. Persentase realisasi terhadap target mencapai 95,82%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY ke depan, tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum tahu kapan akan berakhir, hal ini akan mempengaruhi perencanaan dan penganggaran pembangunan pertanian dan pangan pada tahun-tahun mendatang.
2. Kesejahteraan petani menurun karena dampak pandemi Covid-19.
3. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian menyebabkan kesenjangan regenerasi sumber daya manusia di sektor pertanian.
4. Peningkatan produksi pertanian dengan pengembangan pertanian skala besar melalui korporasi petani dan skala rumah tangga melalui optimasi budidaya pertanian di lahan pekarangan.
5. Ancaman krisis pangan dunia sebagai dampak perubahan iklim global akibat peningkatan emisi karbon mendorong sektor pertanian untuk menciptakan pertanian ramah lingkungan dengan menggunakan pupuk organik dan pengendalian organisme tumbuhan menggunakan agensi hayati.
6. Tindaklanjut Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.
8. Berubahnya preferensi konsumsi masyarakat DIY karena pengaruh melemahnya kondisi perekonomian.
9. Keamanan pangan sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat mulai dari individu perlu terus ditingkatkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	8
BAB 1 Pendahuluan.....	9
1.1 <i>Cascading</i> Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	9
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	12
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	14
1.4 Isu-Isu Strategis.....	17
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	18
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	21
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	22
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	22
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	23
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021	27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	33
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	36
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	37
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	37
3.1 Capaian Kinerja Lainnya	60
3.2 Efisiensi Anggaran	64
3.3 Inovasi	66
BAB 4 Penutup	86
L A M P I R A N	89

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	18
Tabel I.2.	Sarana-Prasarana.....	19
Tabel I.3.	Anggaran Tahun 2021.....	20
Tabel I.4.	Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	21
Tabel II.1.	Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2017-2022.....	23
Tabel II.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	24
Tabel II.3.1.	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	27
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	31
Tabel II.4.1.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2021	33
Tabel II.4.2.	Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2021.....	35
Tabel III.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel III.2.	Capaian Kinerja Tahun 2021.....	37
Tabel III.3.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	39
Tabel III.4.	Pengukuran Capaian Sasaran 1	40
Tabel III.5.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 1	41
Tabel III.6.	Perbandingan PDRB <i>Year on Year</i> (YOY).....	43
Tabel III.7.	Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2021	43
Tabel III.8.	Produksi Tanaman Pangan di D.I. Yogyakarta 2020-2021**	44
Tabel III.9.	Produksi Hortikultura di D.I. Yogyakarta 2020-2021**	46
Tabel III.10.	Produksi Perkebunan di D.I. Yogyakarta 2020-2021**	48
Tabel III.11.	Populasi Peternakan di D.I. Yogyakarta 2020-2021**	49
Tabel III.12.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2	51
Tabel III.13.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 2	51
Tabel III.14.	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2020 dan 2021**	52

Tabel III.15.	Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2021	54
Tabel III.16.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3	56
Tabel III.17.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 3	56
Tabel III.18.	Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2021	59
Tabel III.19.	Capaian Indikator yang Mendukung <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	61
Tabel III.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021	65
Tabel III.21.	Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.....	70

Daftar Gambar

Gambar I.1.	<i>Cascading</i> Kinerja	10
Gambar I.2.	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	12
Gambar I.3.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	14
Gambar II.1.	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	36
Gambar III.1.	Grafik Perbandingan Skor PPH Standar dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2021** (Angka Sangat Sementara)	53
Gambar III.2.	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan Tahun 2014-2021** (Angka Sangat Sementara)	57
Gambar III.3.	Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2017-2021	59
Gambar III.4.	Tingkat Ketersediaan dan Tingkat Konsumsi Energi Rata-Rata Per Kapita per Hari Tahun 2017-2021** (Angka Sangat Sementara)	62
Gambar III.5.	Tingkat Ketersediaan dan Tingkat Konsumsi Protein Rata-Rata Per Kapita per Hari Tahun 2017-2021** (Angka Sangat Sementara)	63
Gambar III.6.	Tampilan Sistem Data Lalu Lintas Ternak	66
Gambar III.7.	Tampilan Sistem Pesan Antar Pasar Mitra Tani Yogyakarta di Aplikasi PAS TANI, <i>Grab Mart</i> , dan <i>Go Food</i>	67
Gambar III.8.	Tampilan <i>Interface</i> Aplikasi Informasi Pelaporan Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim (SI-DOI)	68
Gambar III.9.	Bank Pakan <i>Complete Feed</i>	68

BAB 1

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

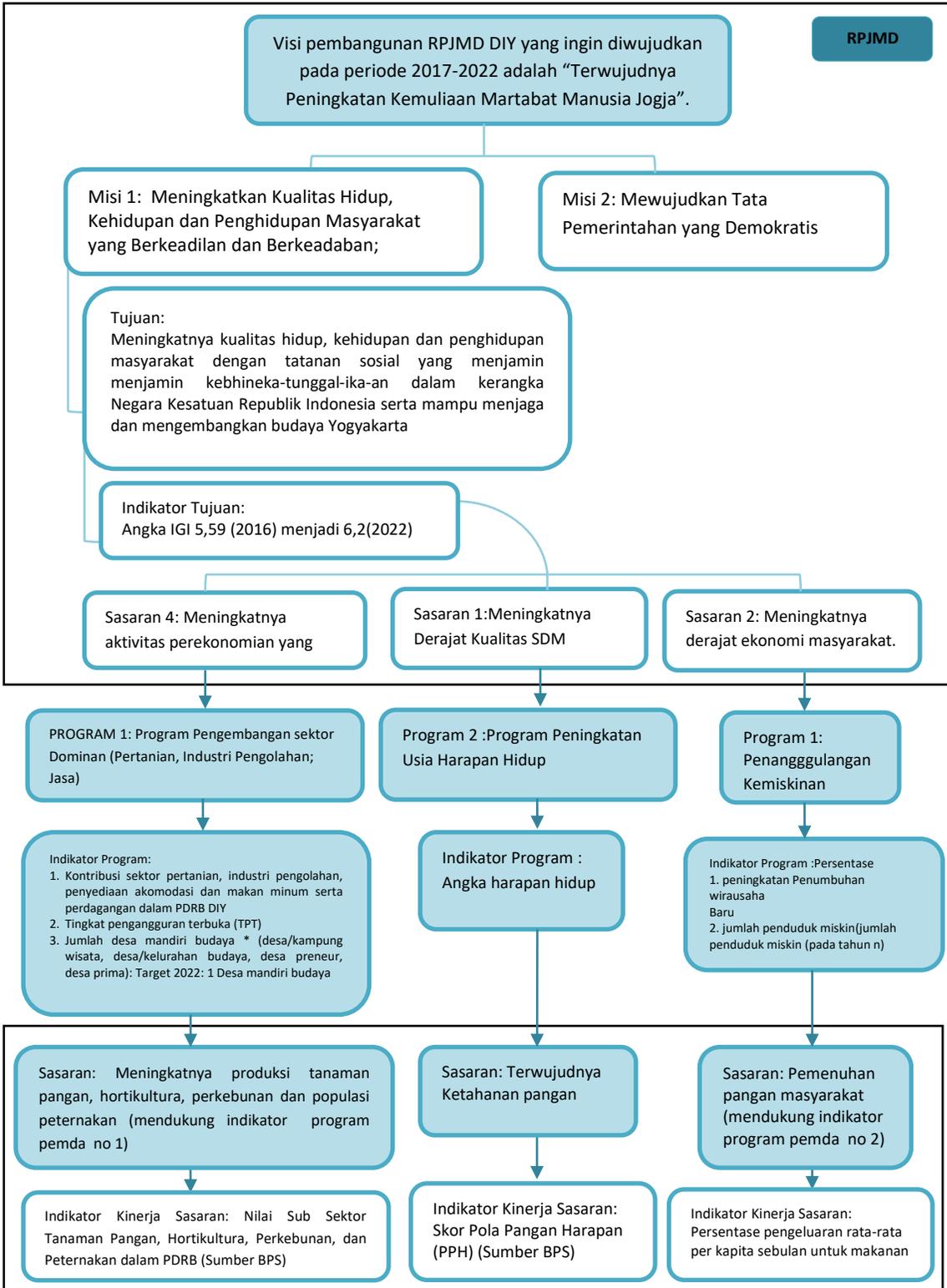
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

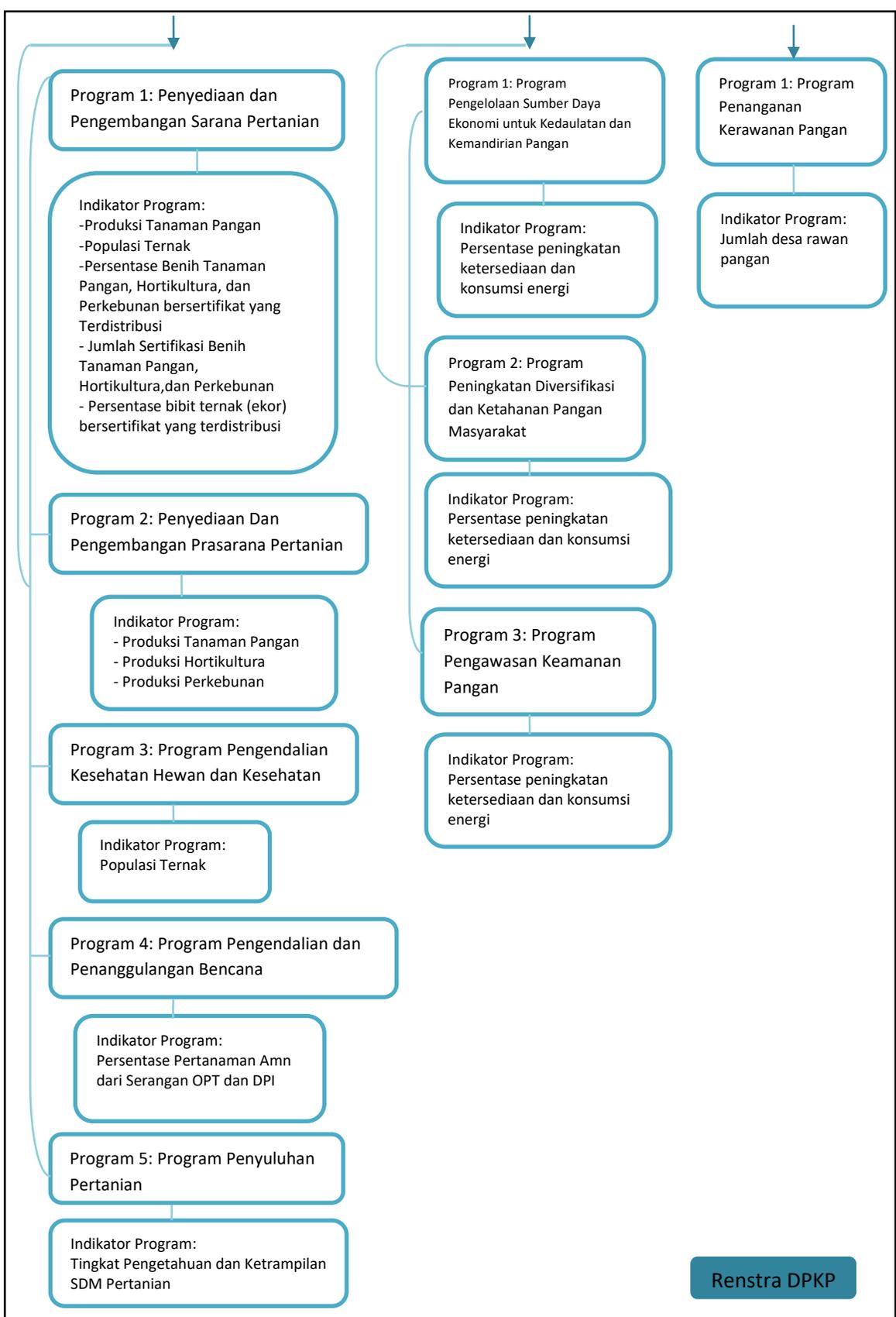
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017-2022. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



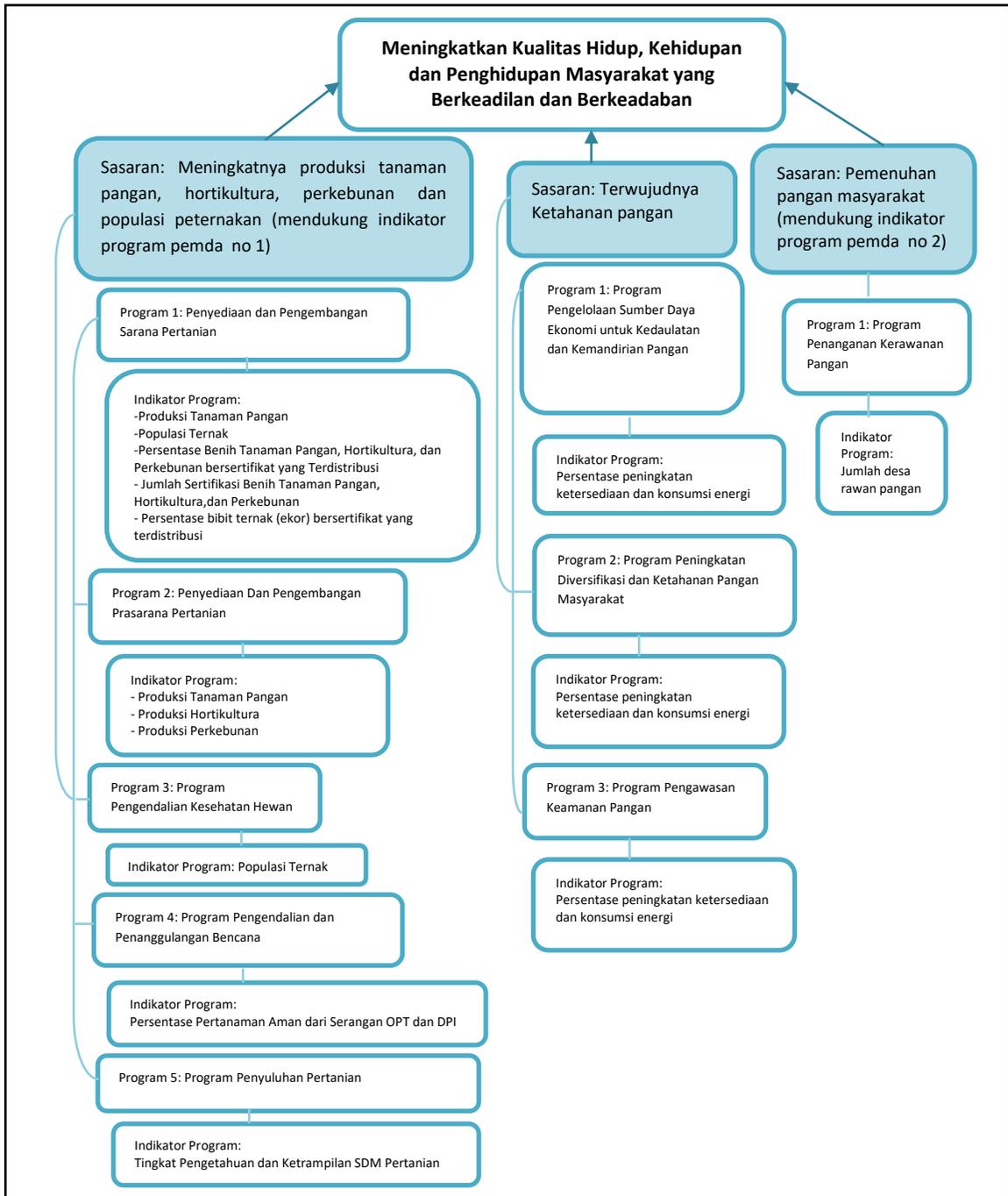


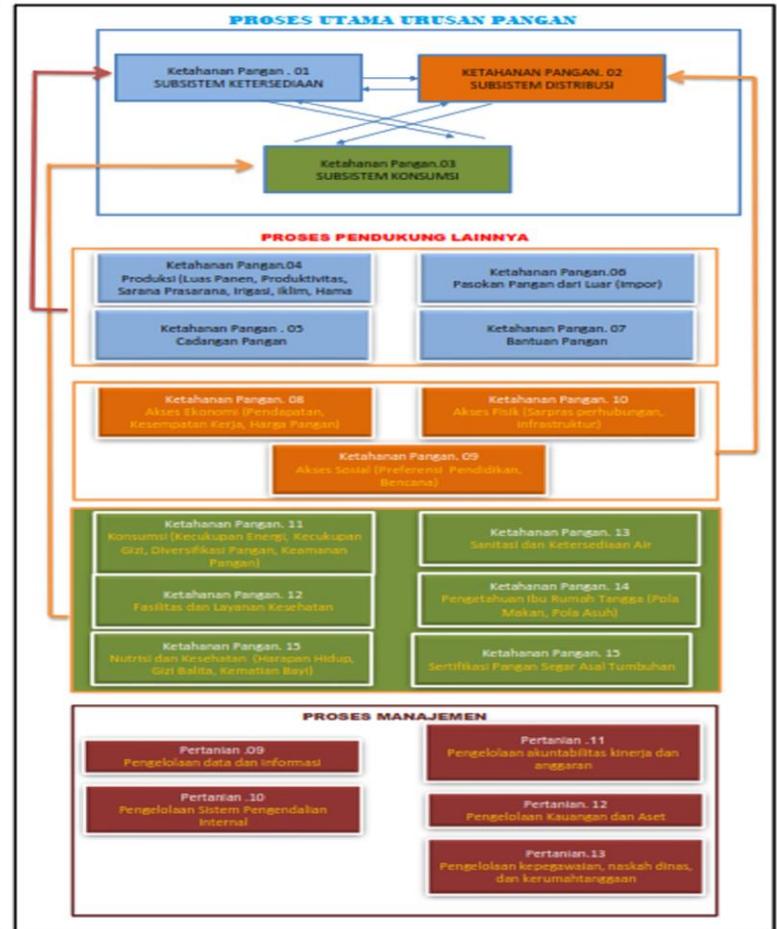
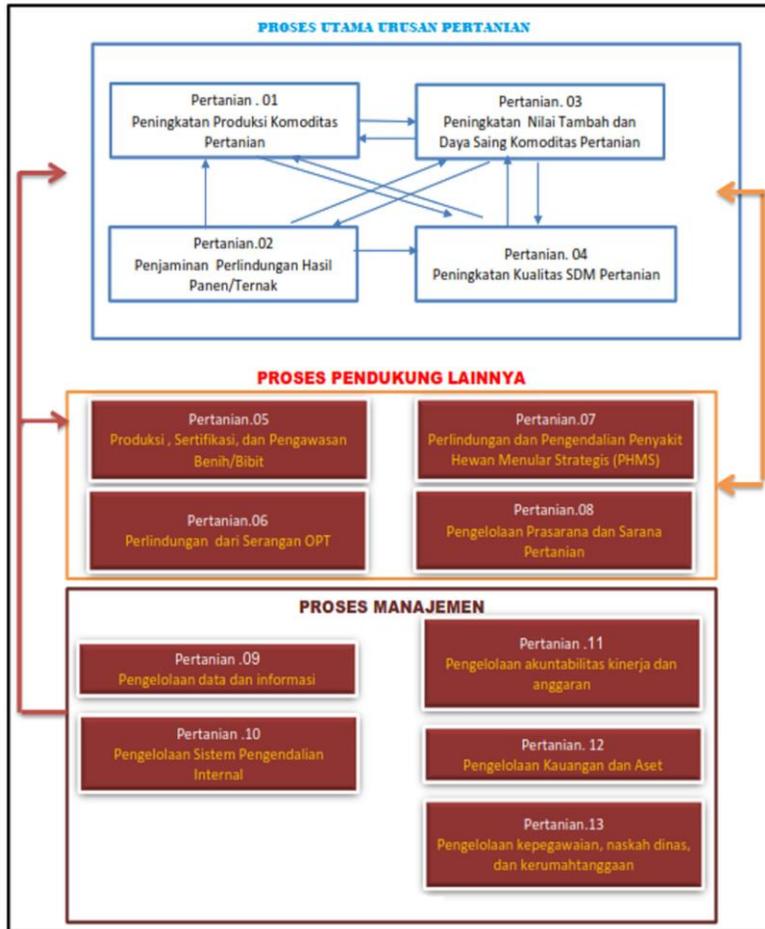
Sumber: Renstra DPKP 2017-2022

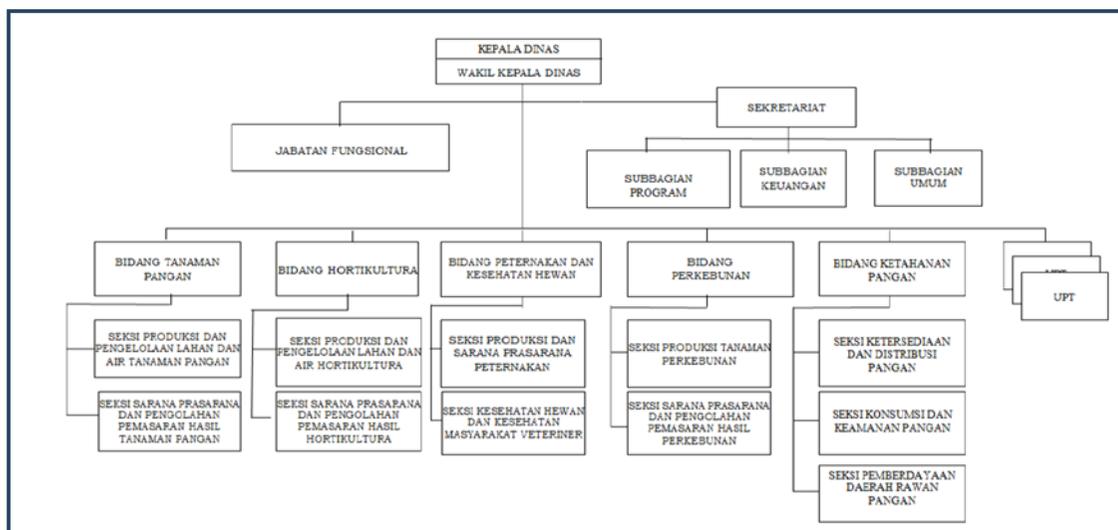
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY







1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan ketahanan pangan;
5. pelaksanaan pengembangan pascapanen, pengolahan, mutu dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
6. Fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
7. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan Kabupaten/Kota;

9. Pelestarian tradisi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
10. Pengembangan kemitraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
11. Fasilitasi, pelayanan, sertifikasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
12. Fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
13. Penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
14. penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
15. penyelenggaraan perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan;
16. penyelenggaraan pengujian mutu dan keamanan pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
17. penyelenggaraan produksi benih sumber tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
18. penyelenggaraan produksi bibit ternak dan bibit pakan ternak;
19. penyelenggaraan diagnostik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; s. pengembangan sumber daya manusia pertanian;
20. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
21. penyelenggaraan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
22. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
23. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
24. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
25. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
26. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
27. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Wakil Kepala Dinas; 3. Sekretariat, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Program; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum. 4. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan; dan b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. 5. Bidang Hortikultura, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura; dan b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura. 6. Bidang Perkebunan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan. 7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan; dan b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan c. Seksi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 10. Jabatan fungsional. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawas Benih Tanaman b. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman c. Widyaiswara d. Medik Veteriner e. Paramedik Veteriner f. Pengawas Bibit Ternak g. Pengawas Mutu Pakan h. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan i. Analis Pasar Hasil Pertanian j. Analis Ketahanan Pangan k. Pengawas Mutu Hasil Pertanian l. Arsiparis m. Pelaksana Barang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dibawah kasubbag program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun program anggaran dan pelaporan 2) Pengelola sistem dan jaringan b. Dibawah kasubbag keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengadministrasian keuangan 3) Pengelola gaji 4) Pengelola akuntansi 5) Verifikator data laporan keuangan c. Dibawah kasubbag umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasian umum 2) Pengadministrasian persuratan 3) Pranata kearsipan 4) Pengadministrasi kepegawaian 5) Teknisi sarana dan prasarana 6) Pengelola barang milik negara 7) pengemudi d. Dibawah kepala seksi produksi dan pengelolaan lahan dan air TP <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola budidaya dan pengembangan TP e. Dibawah kepala seksi sarpras dan pengolahan pemasaran hasil TP <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis pemasaran hasil pertanian f. Dibawah kepala seksi produksi dan pengelolaan lahan dan air hortikultura: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola lahan pertanian g. Dibawah kepala seksi Sarpras dan pengolahan pemasaran hasil hortikultura: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis pemasaran hasil pertanian h. Dibawah kepala seksi produksi tanaman perkebunan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengawas mutu hasil perkebunan i. Dibawah kepala seksi Sarpras dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyuluh perkebunan j. Dibawah kepala seksi produksi dan sarana prasarana peternakan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola budidaya pengembangan ternak dan hewan lainnya k. Dibawah kepala seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawas hygiene, sanitasi usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. l. Dibawah kepala seksi ketersediaan dan distribusi pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola ketahanan pangan m. Dibawah kepala seksi konsumsi dan keamanan pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola pola pangan harapan n. Dibawah kepala seksi pemberdayaan daerah rawan pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2017-2022 antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
2. Upaya peningkatan produksi masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko bencana alam dan perubahan iklim;
3. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
4. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
5. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian;
6. Lemahnya akses petani terhadap permodalan;
7. Pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar regional dan internasional;
8. Kurangnya jumlah SDM di sektor pertanian karena semakin menurunnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian; serta terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;
9. Kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara kelembagaan petani dengan mitra pemasaran;
10. Kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan pola tanam yang tepat.
11. Kondisi kemiskinan yang dapat berlanjut pada kerawanan pangan.
12. Diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan berkelanjutan.
13. Kondisi dan beban ganda keamanan pangan.
14. Peningkatan produksi komoditas perkebunan terutama pada komoditas tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, teh, tembakau, dan cengkeh.
15. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perkebunan.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				2	2				1	1
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	10	10				8	7	1			5	3
	2. Pengawas	26	26				26	13	13			14	12
	3. Pelaksana	171		96	74	1	149	4	54	7	84	96	53
C.	Jabatan Fungsional	201					114	14	83	4	13	63	51
	Jumlah	410	38	96	74	1	299	40	146	11	93	180	119

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Berdasarkan data pada Tabel I.1, jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sejumlah 299 orang dengan jumlah laki laki sebanyak 180 orang dan perempuan sebanyak 119 orang. Jumlah pegawai laki laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan. Tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 146 orang (50,34%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 40 orang (13,80%), D3 11 orang (3,80%), SLTA 93 orang (32,06%). Jumlah formasi sebanyak 410 orang dan pegawai sebanyak 299 orang, hal ini menunjukkan masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 111 orang, terdiri dari 22 orang pejabat pelaksana substantif; 2 pejabat pelaksana administratif dan 87 jabatan fungsional. Komposisi pegawai perempuan dan pegawai laki-laki berimbang, bahkan untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan *gender* dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2. Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
ASET TETAP			
1	TANAH	46 Unit	126.780.807.899,00
2	ALAT BESAR	65 Unit	1.596.937.307,99
3	ALAT ANGKUTAN	314 Unit	7.432.937.829,00
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	51 Unit	316.923.306,00
5	ALAT PERTANIAN	414 Unit	9.144.691.949,97
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.168 Unit	8.134.166.425,90
7	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	279 Unit	1.589.000.850,00
8	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	29 Unit	94.590.115,00
9	ALAT LABORATORIUM	383 Unit	9.031.723.854,99
10	ALAT PERSENJATAAN	10 Unit	30.900.000,00
11	KOMPUTER	508 Unit	3.001.481.479,98
12	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	3 Unit	38.499.000,00
13	RAMBU-RAMBU	4 Unit	49.548.232,00
14	BANGUNAN GEDUNG	167 Unit	107.210.952.365,48
15	MONUMEN	1 Unit	47.750.000,00
16	BANGUNAN MENARA	1 Unit	14.387.000,00
17	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	82 Unit	7.624.857.062,00
18	JALAN DAN JEMBATAN	10 Unit	2.574.642.790,00
19	BANGUNAN AIR	23 Unit	3.820.259.621,90
20	INSTALASI	27 Unit	734.555.681,00
21	JARINGAN	22 Unit	495.398.969,10
ASET TETAP LAINNYA			
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	509 Unit	27.514.080,00
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	14 Unit	280.000,00
3	HEWAN	148 Unit	1.859.015.589,98
4	BIOTA PERAIRAN	40 Unit	2.400.000,00
5	TANAMAN	210 Unit	176.000.000,20
Jumlah		6.528 Unit	291.830.221.409,49

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2021

Total aset yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 6.528 Unit dengan nilai aset Rp. 291.830.221.409,49. Sarana prasarana sebagaimana yang tersaji diatas digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Tabel I.3. Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.538.220.000	1.643.414.926	105.194.926
4 1 02	Retribusi Daerah	1.425.495.000	1.530.689.926	105.194.926
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	112.725.000	112.725.000	0
Jumlah Pendapatan		1.538.220.000	1.643.414.926	105.194.926
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	92.580.123.163	87.028.156.967	-5.551.966.196
5 1 01	Belanja Pegawai	45.563.701.138	44.611.774.054	-951.927.084
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.360.253.025	22.046.341.350	-3.313.911.675
5 1 05	Belanja Hibah	21.656.169.000	20.370.041.563	-1.286.127.437
5 2	BELANJA MODAL	1.377.767.900	1.352.443.900	-25.324.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	858.277.900	852.953.900	-5.324.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	273.730.000	273.730.000	0
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185.760.000	165.760.000	-20.000.000
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.000.000	60.000.000	0
Jumlah Belanja		93.957.891.063	88.380.600.867	-5.577.290.196
Total Surplus/(Defisit)		(92.419.671.063)	(86.737.185.941)	5.682.485.122
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan terlihat pada Tabel I.3 di atas. Anggaran APBD dan DAIS untuk tahun 2021 semula Rp. 93.957.891.063,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 88.380.600.867,00 atau berkurang Rp. 5.577.290.196,00. Perubahan anggaran Tahun 2021 merupakan cerminan dukungan Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan DIY dalam bentuk *refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Tabel I.4. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

NO	SARAN/REKOMENDASI LHE SAKIP (Surat Inspektur DIY Nomor 700/01408 tanggal 15 April 2021)	TINDAK LANJUT
1.	Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY beserta seluruh jajaran agar dapat mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik dan terus berupaya meningkatkan kinerja, terutama tindakan perbaikan yaitu pada pencapaian sasaran/kinerja organisasi baik pada kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>), (<i>outcome</i>) dan IKU.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala beserta seluruh karyawan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan capaian dan meningkatkan capaian sasaran/kinerja organisasi dengan cara mempersiapkan dokumen perencanaan dengan lebih baik, memonitor pelaksanaan kegiatan, dan mengadakan evaluasi atas pencapaian <i>output</i>, <i>outcome</i>, dan kinerja utama secara periodik. 2. Meningkatkan kerjasama dengan para pihak terkait untuk memperkuat jejaring kerja dalam penyelenggaraan urusan pangan dan pertanian yang memerlukan keterlibatan pihak lain sesuai kewenangannya.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017-2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017-2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mempunyai misi **“Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban”**. Terkait hal tersebut tujuan

jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”.

Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1. Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultur, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) <i>(Sumber BPS)</i>	Juta Rupiah	6.903.079	7.041.831	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757	7.327.757
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88,5	89,92	90,22	90,52	90,82	91,12	91,12
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	40,52	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65	38,65

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengamankan produksi komoditas utama dan unggulan daerah; 2. Meningkatkan mutu produk tanaman pangan hortikultura berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan; 3. Memperkuat kelembagaan petani dan memberdayakan petani dalam melakukan agribisnis produk unggulan pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM petani; 4. Meningkatkan penggunaan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat; 5. Mengembangkan potensi ternak lokal; 6. Mengembangkan kawasan berbasis komoditas unggulan; 7. Membangun sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 8. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; 9. Mengembangkan teknologi produksi pertanian domestik melalui penerapan <i>Good Agriculture Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP)</i>; 10. Mengendalikan organisme pengganggu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani; 2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan; 3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana); 4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani; 5. Pengembangan sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 6. Pendampingan dan pengawalan kelompok. 7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>tumbuhan (OPT), mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian;</p> <p>11. Menyediakan sarana prasarana (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumber daya air, dan permodalan);</p> <p>12. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Good Distribution Practices</i> (GDP) dan <i>Good Marketing/Retail Practices</i> (GRP);</p> <p>13. Mempromosikan dan memasarkan produk pertanian di pasar domestik maupun internasional;</p> <p>14. Melindungi petani melalui regulasi subsidi harga produk;</p> <p>15. Memfasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);</p> <p>16. Menumbuhkembangkan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi</p>	

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>muda;</p> <p>17. Mengembangkan kemitraan antar poktan/gapoktan/lembaga petani dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan (<i>supply chain management</i>);</p>	
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, konsumsi, dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor 2. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah) 3. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal 4. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan 5. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilisasi harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan. 6. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan 2. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat 3. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	1.1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22.360.856.000	21.631.140.000	(729.716.000)
	1.1.1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.066.075.000	3.688.545.000	(377.530.000)
	1.1.1.1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.066.075.000	3.688.545.000	(377.530.000)
	1.1.2. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	13.063.488.000	12.848.288.000	(215.200.000)
	1.1.2.1. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	13.063.488.000	12.848.288.000	(215.200.000)
	1.1.3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.662.442.000	1.577.723.000	(84.719.000)
	1.1.3.1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	120.620.000	105.921.000	(14.699.000)
	1.1.3.2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	618.730.000	590.330.000	(28.400.000)
	1.1.3.3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	789.964.000	754.829.000	(35.135.000)
	1.1.3.4. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	133.128.000	126.643.000	(6.485.000)
	1.1.4. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.568.851.000	3.516.584.000	(52.267.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.4.1. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.568.851.000	3.516.584.000	(52.267.000)
	1.2. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.733.024.000	6.461.338.750	(1.271.685.250)
	1.2.1. Penataan Prasarana Pertanian	7.733.024.000	6.461.338.750	(1.271.685.250)
	1.2.1.1. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.071.000.000	1.004.110.000	(66.890.000)
	1.2.1.2. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.776.367.000	2.987.548.750	(788.818.250)
	1.2.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1.896.750.000	1.632.150.000	(264.600.000)
	1.2.1.4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	988.907.000	837.530.000	(151.377.000)
	1.3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.866.211.000	1.760.307.000	(105.904.000)
	1.3.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	333.088.500	278.688.500	(54.400.000)
	1.3.1.1. Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	333.088.500	278.688.500	(54.400.000)
	1.3.2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	576.035.000	545.311.000	(30.724.000)
	1.3.2.1. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	32.140.000	3.216.000	(28.924.000)
	1.3.2.2. Pengawasan dan Pemeriksaan	543.895.000	542.095.000	(1.800.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi			
	1.3.3. Kesejahteraan Hewan	43.227.500	19.563.500	(23.664.000)
	1.3.3.1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	43.227.500	19.563.500	(23.664.000)
	1.3.4. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	913.860.000	916.744.000	2.884.000
	1.3.4.1. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	913.860.000	916.744.000	2.884.000
	1.4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	744.428.000	696.028.000	(48.400.000)
	1.4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	744.428.000	696.028.000	(48.400.000)
	1.4.1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	744.428.000	696.028.000	(48.400.000)
	1.5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.884.681.200	3.521.849.700	(362.831.500)
	1.5.1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	402.940.000	102.713.500	(300.226.500)
	1.5.1.1. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	402.940.000	102.713.500	(300.226.500)
	1.5.2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.481.741.200	3.419.136.200	(62.605.000)
	1.5.2.1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.197.203.200	3.180.168.200	(17.035.000)
	1.5.2.2. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	284.538.000	238.968.000	(45.570.000)
2. Terwujudnya ketahanan pangan	2.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	340.000.000	309.615.500	(30.384.500)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.1.1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	340.000.000	309.615.500	(30.384.500)
	2.1.1.1. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	340.000.000	309.615.500	(30.384.500)
	2.2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.014.669.000	726.138.000	(288.531.000)
	2.2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	421.976.000	399.716.000	(22.260.000)
	2.2.1.1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	197.780.000	189.220.000	(8.560.000)
	2.2.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	114.899.000	101.649.000	(13.250.000)
	2.2.1.3. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	109.297.000	108.847.000	(450.000)
	2.2.2. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	592.693.000	326.422.000	(266.271.000)
	2.2.2.1. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	592.693.000	326.422.000	(266.271.000)
	2.3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	156.044.000	137.633.250	(18.410.750)
	2.3.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	156.044.000	137.633.250	(18.410.750)
	2.3.1.1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	36.940.000	35.940.000	(1.000.000)
	2.3.1.2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	77.585.250	67.955.250	(9.630.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.3.1.3. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	41.518.750	33.738.000	(7.780.750)
3. Pemenuhan Pangan Masyarakat	3.1. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	506.483.000	497.747.500	(8.735.500)
	3.1.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	85.973.000	77.737.500	(8.235.500)
	3.1.1.1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	85.973.000	77.737.500	(8.235.500)
	3.1.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	420.510.000	420.010.000	(500.000)
	3.1.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	420.510.000	420.010.000	(500.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		38.606.396.200	35.741.797.700	(2.864.598.500)

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.913.251.863	49.253.612.104	(1.659.639.759)
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.527.500	111.739.000	(10.788.500)
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.218.500	89.230.000	(2.988.500)
	1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.309.000	22.509.000	(7.800.000)
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.575.701.138	44.623.774.054	(951.927.084)
	3.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.377.761.138	44.425.834.054	(951.927.084)
	3.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	185.940.000	185.940.000	0
	3.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000	12.000.000	0
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.200.000	16.454.500	(13.745.500)
	4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.200.000	16.454.500	(13.745.500)

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	757.284.500	283.649.500	(473.635.000)
	4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.659.000	18.134.000	(525.000)
	4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.426.500	44.701.500	32.275.000
	4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.223.500	53.948.500	(3.275.000)
	4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.776.000	17.832.000	(1.944.000)
	4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	633.390.000	134.349.000	(499.041.000)
	4.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.809.500	14.684.500	(1.125.000)
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.159.000	116.251.000	(10.908.000)
	5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.803.000	81.363.000	11.560.000
	5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.356.000	34.888.000	(22.468.000)
	6. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	3.034.009.925	2.927.329.250	(106.680.675)
	6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.268.000	81.668.000	(3.600.000)
	6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.103.298.125	1.000.217.450	(103.080.675)
	6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.845.443.800	1.845.443.800	0
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.266.369.800	1.174.414.800	(91.955.000)
	7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.046.000	28.898.000	(5.148.000)
	7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	761.779.400	722.197.400	(39.582.000)
	7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.660.000	19.260.000	(3.400.000)
	7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	388.638.800	351.638.800	(37.000.000)

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.245.600	52.420.600	(6.825.000)
Total Anggaran Pendukung		50.913.251.863	49.253.612.104	(1.659.639.759)

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY adalah sebagai berikut:

**Tabel II.4.1. Perjanjian Kinerja Kepala
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (<i>Sumber BPS</i>)	Juta rupiah	7.255.205	Triwulan I	7.255.205
					Triwulan II	7.255.205
					Triwulan III	7.255.205
					Triwulan IV	7.255.205*)
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,82	Triwulan I	90,82
					Triwulan II	90,82
					Triwulan III	90,82
					Triwulan IV	90,82
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	39,19	Triwulan I	39,19
					Triwulan II	39,19
					Triwulan III	39,19
					Triwulan IV	39,19*)

Keterangan Tambahan:

1. *) Data capaian kinerja bersumber dari BPS, Angka Sementara baru dirilis bulan Februari atau Maret tahun berikutnya sehingga capaian akhir tahun menggunakan Angka Prediksi OPD.
2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman Rp. 4.438.243.000.
3. Pengelolaan dana APBN Dekonsentrasi sebesar Rp 21.853.352.000 melalui program:
 - a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - c. Program Dukungan Manajemen
4. Pengelolaan dana APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp 53.358.260.000 melalui program:
 - a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - c. Program Dukungan Manajemen

Pada tahun 2021, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melaksanakan *review* Perjanjian Kinerja Tahun 2021. *Review* dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian Kinerja *Review* Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.4.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (<i>Sumber BPS</i>)	Juta rupiah	7.255.205	Triwulan I	7.255.205
					Triwulan II	7.255.205
					Triwulan III	7.255.205
					Triwulan IV	7.255.205*)
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,82	Triwulan I	90,82
					Triwulan II	90,82
					Triwulan III	90,82
					Triwulan IV	90,82
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	39,19	Triwulan I	39,19
					Triwulan II	39,19
					Triwulan III	39,19
					Triwulan IV	39,19*)

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 5,94% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. Data capaian kinerja bersumber dari BPS, Angka Sementara baru dirilis bulan Februari atau Maret tahun berikutnya sehingga capaian akhir tahun menggunakan Angka Prediksi OPD.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman Rp. 3.385.191.063.
4. Mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp. 453.255.000 melalui:
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp. 353.255.000.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengawasan

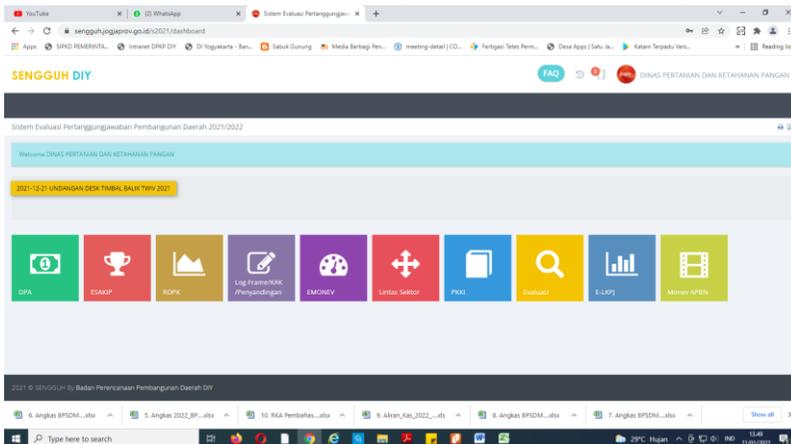
Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Rp 100.000.000.

5. Pengelolaan dana APBN Dekonsentrasi sebesar Rp. 4.501.241.000 melalui program:
 - a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - c. Program Dukungan Manajemen
6. Pengelolaan dana APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp. 49.313.550.000 melalui program:
 - a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - c. Program Dukungan Manajemen

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2021
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi
4. Lintas Sektor

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/MET A INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALI SASI**	PERSEN TASE**	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Indikator: Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	Juta Rupiah	6.903.079	7.464.189*	7.255.205	7.496.829 **	103,33	Sangat Baik	7.327.757

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/MET A INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALI SASI**	PERSEN TASE**	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meta ndikator: Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahunan (ADHK)								
2	Terwujudnya ketahanan pangan	Indikator: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Meta indikator: % AKG X Bobot	Skor	88,5	94,70	90,82	94,70	104,27	Sangat Baik	91,12
3	Pemenuhan pangan masyarakat	Indikator: Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan Meta indikator: Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dibagi pengeluaran rata-rata perkapita sebulan total dikali 100% (Data BPS)	Persen	40,52	41,03	39,19	40,83***	95,82	Sangat Baik	38,65

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

***) Angka Prediksi

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2022

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

Kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan diukur dengan indikator Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dalam PDRB (Sumber BPS). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan.	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun n (ADHK)

Sasaran strategis 1 **“Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan”** didukung oleh 9 program sesuai RPJMD DIY atau 5 Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, dengan indikator program yakni: (1) produksi tanaman pangan (ton), (2) produksi hortikultura (ton), (3) populasi ternak (animal unit), (4) produksi perkebunan (ton), (5) persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%), (6) jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ha), (7) persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%), (8) persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%), dan (9) tingkat pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (nilai/skor).

Indikator sasaran strategis 1 **“Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)”**, sumber data diolah dari hasil perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik DIY (BPS DIY) dengan memperhitungkan sumbangan sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada tahun 2021 berdasarkan metode hitung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Hasil penghitungan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2021 (ADHK) diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

No.	Sub Kategori	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian	6.723.851	6.905.892	7.006.249	7.464.189	7.496.829
a.	Tanaman Pangan	2.895.314	2.950.946	2.940.429	3.233.401	3.073.421
b.	Tanaman Hortikultura	1.974.731	2.021.184	2.084.243	2.209.320	2.304.182
c.	Tanaman Perkebunan	210.219	218.349	232.059	251.243	218.252
d.	Peternakan	1.643.587	1.715.413	1.749.517	1.770.224	1.900.975
PDRB DIY		92.300.244	98.024.014	104.485.459	101.683.520	107.308.555
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB DIY (%)		7,28	7,05	6,71	7,34	6,99

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2022

Capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2021 berdasarkan harga konstan (dalam juta rupiah) dari data BPS Provinsi DIY yaitu sebesar 7.496.829 atau tercapai sebesar 103,33% dari target tahun 2021. Dibandingkan tahun 2020, capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB tahun 2021 meningkat sebesar 0,44% dan sektor pertanian berkontribusi sebesar 6,99% terhadap capaian total PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan harga konstan (ADHK).

Sebagai data dukung, capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk produksi tanaman pangan tahun 2021 sebesar 2.314.312 ton atau terealisasi 100,05% dari target 2.313.255 ton, hortikultura tercapai 424.046 ton atau terealisasi 105,71% dari target 401.150 ton, perkebunan tercapai 69.181,13 ton atau terealisasi 100,04% dari target 69.153 ton, dan peternakan tercapai 603.278 Animal Unit atau terealisasi 96,23% dari target 626.885 Animal Unit.

Penurunan nilai PDRB tahun 2021 pada sub sektor tanaman pangan sebesar 4,95% dipengaruhi oleh penurunan produksi sebesar 2,64%. Subsektor hortikultura mengalami peningkatan produksi 3,09%, sejalan dengan peningkatan nilai PDRB sebesar 4,29%. Subsektor perkebunan mengalami peningkatan produksi 6,98%, namun nilai PDRB mengalami penurunan sebesar 13,13% dibanding tahun 2020, karena peningkatan produksi hanya pada komoditas yang memiliki nilai ekonomis rendah seperti komoditas kelapa. Subsektor peternakan mengalami penurunan populasi total sebesar 0,44%, namun nilai PDRB mengalami peningkatan sebesar 7,39% karena pada ternak yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti sapi potong, kambing, dan domba terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan positif nilai PDRB sektor pertanian pada masa pandemi tentu memberikan harapan akan kelangsungan produksi pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena pertanian masih memberikan peluang yang menjanjikan.

Capaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indikator kinerja nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan berdasarkan Permendagri Nomor 89 Tahun 2017 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Kinerja sasaran meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020*	2021**			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi**	% Realisasi**		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	7.464.189*	7.255.205	7.496.829**	103,33 [[7.496.829/ 7.255.205] x 100%]	7.327.757	102,31% [[7.496.829/ 7.327.757] x 100%]

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020*	2021**			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi**	% Realisasi**		
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam PDRB (Juta Rupiah) (Sumber BPS)						

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: **“Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan”** adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) tercapai 7.496.829 (juta rupiah), dengan persentase capaian 103,33% dari target 2021.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat peningkatan sebesar 0,44%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 102,31%, diproyeksikan indikator kinerja sasaran ini akan berhasil tercapai di akhir periode RPJMD.
- d. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 didukung oleh:

Kontribusi produksi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang didukung oleh program bantuan berupa sarana dan prasarana serta pendampingan intensif bagi petani sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas. Adanya dukungan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dukungan program perbenihan tanaman pertanian, dukungan program perbibitan ternak, program pengembangan SDM Pertanian, dan pencegahan serta pengendalian penyakit hewan menular yang baik di wilayah DIY sehingga mendukung peningkatan produksi pertanian.

Perbandingan pencapaian dari tahun 2020 ke tahun 2021 terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.6. Perbandingan PDRB Year on Year (YoY)

No	Indikator Sasaran	PDRB 2020*	PDRB 2021**)	Perbandingan PDRB 2021** terhadap 2020*)	Pertumbuhan Antar Tahun
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (Juta Rupiah) (Sumber BPS)	7.464.189*)	7.496.829**)	100,44% [[7.496.829/ 7.464.189) x 100%]	0,44% [[((7.496.829- 7.464.189) / 7.464.189) x 100%]

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan pencapaian PDRB tahun 2021 sebesar 7.496.829 juta rupiah atau tercapai sebesar 103,33% dari target tahun 2021. Perbandingan capaian PDRB tahun 2021 terhadap capaian tahun 2020 sebesar 100,44% atau nilai pertumbuhan antar tahunnya sebesar 0,44%.

Kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat yang dapat dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui PDRB sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan sumberdaya yang dihasilkan suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan dalam pengembangan sektor perekonomian dan pengolahan sumber daya yang ada.

Tabel III.7. Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2021

No.	Indikator Program	Kinerja		
		Target	Realisasi**	% Realisasi
1	Produksi tanaman pangan (ton)	2.313.255	2.314.312**	100,05
2	Produksi hortikultura (ton)	401.150	424.046**	105,71
3	Produksi Perkebunan (ton)	69.153	69.181,13**	100,04
4	Populasi ternak (Animal Unit (AU)	626.885	603.278**	96,23
5	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (nilai/skor)	75	75	100,00
6	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura (hektar)	800	802,3	100,29

No.	Indikator Program	Kinerja		
		Target	Realisasi**	% Realisasi
7	Persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95	96,42	101,49
8	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat yang terdistribusi (%)	89	89,08	100,09
9	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	96	100	104,17

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Capaian sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh capaian produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Berdasarkan tabel di atas, realisasi produksi tanaman pangan di tahun 2021 sebesar 2.314.312 ton atau terealisasi sebesar 100,05% dari target yang ditetapkan 2.313.255 ton. Pencapaian target dihitung dari nilai produksi dalam satuan ton (produksi (ton) = luas panen (ha) x produktivitas (ton/ha)) dan menjumlahkan hasil produksi tanaman pangan selama 1 tahun menggunakan Angka Sangat Sementara dengan rincian:

Tabel III.8. Produksi Tanaman Pangan di D.I. Yogyakarta 2020-2021**

No.	Komoditas	Produksi (Ton)		
		2019	2020**	% Peningkatan/ Penurunan
1	Padi	848.140,00	855.365,00	0,85
3	Jagung	369.347,00	362.525,00	-1,85
4	Kacang Kedelai	7.969,00	8.482,00	6,44
5	Kacang Tanah	75.119,00	84.846,00	12,95
6	Kacang Hijau	531,00	451,00	-15,07
7	Ubi Kayu	1.072.314,00	1.000.443,00	-6,70
8	Ubi Jalar	2.765,00	2.209,00	-20,11
9	Sorghum	-	-	0,00
Jumlah		2.376.185,00	2.314.321,00	-2,60

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui komoditas yang berkontribusi paling dominan terhadap produksi tanaman pangan adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang tanah, dan kedelai. Komoditas ubi kayu merupakan penyumbang terbesar produksi tanaman pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 sebesar 43,23%, disusul dengan komoditas padi sebesar 36,96%, dan komoditas jagung sebesar 15,66%.

Total produksi tanaman pangan tahun 2021 sebesar 2.314.312 ton, mengalami penurunan sebesar 62.873 ton (-2,64%) dari tahun 2020. Komoditas yang mengalami penurunan meliputi jagung, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Penurunan produksi jagung dikarenakan tidak sempurnanya pembungaan dan pengisian biji pada tongkol akibat kondisi iklim tahun 2021 sehingga menyebabkan produktivitas jagung menurun. Komoditas ubi kayu, kacang hijau dan ubi jalar mengalami penurunan disebabkan petani beralih ke komoditas lain yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi.

Produksi padi, kedelai, dan kacang tanah mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, karena adanya dukungan pemerintah dalam pengembangan kawasan padi dan kedelai berupa penyediaan benih unggul yang bersertifikat, penyediaan sarana prasarana yang mendukung peningkatan produksi serta pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan antisipasi dampak perubahan iklim sedini mungkin.

Peluang pasar untuk komoditas hortikultura seperti cabai besar, cabai rawit, bawang merah, buah-buahan dan tanaman hias pada masa pandemi selalu terbuka lebar. Komoditas ini dibudidayakan oleh petani karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding komoditas tanaman pangan. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2021 (angka sementara), produksi total tanaman hortikultura di DIY tahun 2021 sebesar 424.046 ton tercapai 105,71% dari target 2021 sebesar 401.150 ton. Dibandingkan dengan produksi tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 3,09% yaitu sebesar sebesar 411.340 ton.

Tabel III.9. Produksi Hortikultura di D.I. Yogyakarta 2020-2021**

No	Komoditas	Produksi (Ton)		% Peningkatan/ Penurunan
		2020	2021**	
1	Cabai besar	44.521	38.378	-13,80
2	Cabai rawit	15.052	15.933	5,85
3	Bawang merah	18.811	29.809	58,47
4	Mangga	29.833	33.456	12,14
5	Durian	6.771	9.258	36,73
6	Pisang	66.730	68.207	2,21
7	Salak	54.996	57.290	4,17
8	Pepaya	13.995	14.653	4,70
9	Semangka	8.909	5.184	-41,81
10	Melon	22.230	14.550	-34,55
11	Jahe	4.532	5.121	13,00
12	Kunyit	3.085	3.374	9,37

*Keterangan: ** Angka Sangat Sementara*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Komoditas sayuran strategis yang mengalami kenaikan adalah bawang merah dan cabai rawit. Produksi bawang merah pada tahun 2021 sebesar 29,809 ton naik sangat signifikan sebesar 58,47% dibandingkan produksi bawang merah tahun 2020 sebesar 18.811 ton. Produksi cabai rawit meningkat dari 15.052 ton menjadi 15.933 ton di tahun 2021 atau naik 5,85% dibanding tahun 2020. Kenaikan produksi bawang merah dan cabai rawit ini disebabkan antara lain harga bawang merah dan cabai rawit cukup bagus. Untuk produksi cabai besar di Daerah istimewa pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 13,8% dengan produksi 38.378 ton dibandingkan dengan produksi cabai besar pada tahun 2020 sebesar 44.521 ton. Produksi cabai besar mengalami penurunan karena perubahan iklim yang ekstrim dan fluktuasi harga untuk komoditas cabai besar yang sangat dinamis. Pada saat harga murah petani enggan melakukan perawatan tanaman cabainya, sehingga produksinya rendah.

Produksi buah-buahan pada tahun 2021 di DIY meningkat 5,05% dengan total produksi buah sebesar 281.983 ton dibandingkan produksi tahun 2020 sebesar 127.776 ton. Komoditas buah unggulan yang mengalami kenaikan adalah Salak, Mangga dan Pisang. Produksi salak pada tahun 2021 meningkat 4,2% atau sebesar 57.296 ton dibandingkan produksi pada tahun 2020 sebesar

54.996 ton. Produksi manga pada tahun 2021 naik 15,4% sebesar 33.456 ton dibandingkan produksi pada tahun 2020 sebesar 28.985 ton. Sedangkan produksi pisang pada tahun 2021 mengalami kenaikan 2,3% sebesar 68.257 ton dibandingkan produksi pada tahun 2020 sebesar 66.730 ton.

Kenaikan produksi hortikultura didukung oleh kondisi pasar yang semakin membaik, penerapan GAP (*Good Agriculture Practice*) dan SOP (*Standard Operating Procedure*) di tingkat petani, adanya stimulan bantuan dari pemerintah baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi, pendampingan dari petugas lapangan pertanian, serta sarana prasarana pendukung untuk proses produksi maupun pasca panen hortikultura.

Komoditas buah-buahan utama lainnya yakni semangka dan melon produksinya menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terjadi di Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul hanya Bantul yang mengalami kenaikan. Sebagian besar petani semangka dan melon menggunakan sistem sewa lahan, dan modal untuk budidaya kedua komoditas ini cukup tinggi sehingga kondisi permintaan pasar yang masih belum stabil di masa pandemi ini menurunkan minat budidaya para petani.

Untuk tanaman biofarmaka, produksi di Daerah Istimewa Yogyakarta secara total pada tahun 2021 mengalami kenaikan 7,82% sebesar 16.333 ton dibandingkan produksi biofarmaka pada tahun 2020 sebesar 15.148 ton. Komoditas unggulan untuk biofarmaka yaitu jahe dan kunyit produksinya juga mengalami kenaikan. Produksi jahe tahun 2021 naik 13% sebesar 5.121 ton dibandingkan produksi tahun 2020 sebesar 4.532 ton. Demikian juga produksi kunyit pada tahun 2021 naik 9,4% sebesar 3.374 ton dibandingkan produksi pada tahun 2020 sebesar 3.085 ton. Kenaikan produksi biofarmaka ini didorong harga komoditas biofarmaka yang cukup baik yang disebabkan kebutuhan biofarmaka pada era Pandemi Covid 19 cukup tinggi, sehingga mendorong petani untuk memproduksi biofarmaka secara intensif.

Perkebunan selain menjadi kontributor dalam PDRB juga memiliki peran ekologis. Peran ekologis perkebunan adalah menjadi paru-paru ekosistem yang menyerap dan mereduksi karbondioksida sekaligus mengeluarkan oksigen di atmosfer bumi, penyedia bahan bakar nabati dan *bioenergy* yang bersifat ramah lingkungan yang terbarukan, penurunan emisi gas rumah kaca serta mendukung pelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu, didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat sesuai rekomendasi, dan penerapan sistem manajemen usaha tani yang sesuai. Pengembangan kakao, kopi, teh dan kelapa didanai melalui dana APBN Perkebunan dalam kerangka agenda prioritas agroindustri sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Tabel III.10. Produksi Perkebunan di D.I. Yogyakarta 2020-2021**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2020	2021**	% Peningkatan/ Penurunan	
1	Kelapa	48.375,90	51.727,30	6,93	kopra
2	Tebu	11.035,49	10.854,85	-1,64	gula hablur
3	Kakao	1.893,99	2.145,65	13,29	biji kering

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Capaian produksi perkebunan per tahun mengalami fluktuasi dan mulai mengalami peningkatan kembali mulai tahun 2020 dan berlanjut hingga 2021 karena adanya dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19. Capaian produksi perkebunan tahun 2021 sebesar 69.181,13 ton atau tercapai sebesar 100,04% dari target 69.153 ton.

Komoditas kelapa mengalami peningkatan sebesar 6,93% dan kakao meningkat 13,29%. Peningkatan produksi komoditas tersebut didukung melalui program peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan dengan implementasi kegiatan seperti rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pengolahan, fasilitasi pemasaran, standarisasi mutu, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan. Komoditas unggulan perkebunan yang masih dalam tahap inisiasi tetap dikembangkan dan difasilitasi Direktorat Jenderal Perkebunan melalui penyediaan benih/varietas unggul, pembangunan/pemeliharaan

kebun sumber benih (demplot, kebun induk, kebun entres dan lain-lain), pengendalian OPT, penanganan pascapanen, pemberdayaan pekebun, peningkatan kapasitas Sumber Daya Insani (SDI) dan penguatan kelembagaan. Sedangkan dalam tahap penumbuhan/pengembangan selain penguatan aspek budidaya dan perlindungan perkebunan juga difasilitasi aspek pengolahan, standarisasi mutu dan pemasarannya. Tebu mengalami penurunan 1,64% dikarenakan adanya kondisi iklim tahun 2021 sehingga menyebabkan produktivitas tebu menurun.

Tabel III.11. Populasi Peternakan di D.I. Yogyakarta 2020-2021**

No	Komoditas	Populasi (Animal Unit (AU))		
		2020	2021**	% Peningkatan/ Penurunan
1	Sapi Potong	235.037	240.787	2,45
2	Sapi Perah	2.675	2.674	-0,04
3	Kambing	45.804	47.385	3,45

*Keterangan: ** Angka Sangat Sementara*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Populasi sapi potong mengalami peningkatan sebesar 2,45% atau mengalami penambahan populasi sebanyak 5.750 AU dari semula 235.037 AU di tahun 2020 menjadi 240.787 AU di tahun 2021. Hal ini didukung oleh adanya program unggulan Kementerian Pertanian yang memfokuskan pada kegiatan optimalisasi reproduksi meliputi fasilitasi sarana prasarana, operasional inseminasi buatan, dukungan akses pembiayaan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitasi premi asuransi sapi betina produktif, dan pengawasan pemotongan betina produktif.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah sentra pengembangan sapi perah penghasil susu, yang meliputi 3 wilayah Kapanewon yaitu Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Turi. Populasi sapi perah menurun 0,04% atau sebanyak 1 AU dari semula 2.675 AU di tahun 2020 dengan jumlah produksi susu 5.385.600 liter menjadi 2.674 AU di tahun 2021 dengan jumlah produksi susu 5.160.092 liter. Penurunan populasi sapi perah karena turunnya minat generasi muda untuk menjadi peternak.

Populasi kambing mengalami peningkatan sejumlah 1.581 AU (3,45%). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi permintaan pasar akan susu kambing dalam

bentuk segar maupun olahan yang cukup besar. Sampai saat ini kebutuhan susu kambing di DIY belum dapat dipenuhi seluruhnya oleh para peternak lokal. Keadaan ini mendorong meningkatnya minat petani peternak untuk membudidayakan ternak kambing terutama kambing perah.

Pada tahun 2021 terdapat kejadian penyakit hewan strategis yaitu serangan Avian Influenza (AI) sebanyak 4 kali serangan dan semuanya dapat dikendalikan dengan baik sehingga penyakit bisa dilokalisir dan tidak menyebar ke wilayah yang lebih luas. Tindakan pencegahan dilakukan melalui vaksinasi.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Dukungan anggaran baik melalui dana APBD, Dana Keistimewaan, dan APBN dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan per subsektor.
- b. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan.
- c. SDM aparatur pelaksana yang kompeten.
- d. Penyediaan benih unggul yang bersertifikat.
- e. Penyediaan sarana prasarana yang mendukung peningkatan produksi.
- f. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) danantisipasi dampak perubahan iklim sedini mungkin.
- g. Penerapan GAP (*Good Agriculture Practice*) dan SOP (*Standard Operating Procedure*) di tingkat petani.
- h. Pendampingan dari petugas lapangan pertanian.
- i. Peningkatan ketersediaan dan mutu bibit ternak, tanaman pakan ternak, dan bahan pakan.
- j. Peningkatan kapasitas SDM peternak melalui bimbingan teknis budidaya peternakan dan pengembangan pakan.
- k. Optimalisasi reproduksi ternak betina.
- l. Pengawasan pemotongan betina produktif.
- m. Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.
- n. penerapan sistem manajemen usaha tani yang sesuai
- o. Rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu.
- p. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Insani (SDI), pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan.
- q. Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih.

- r. Penanganan pascapanen, pengolahan, fasilitasi pemasaran, standarisasi mutu, pembinaan usaha pertanian yang berkelanjutan.
- s. Pelayanan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan.

3.1.2. Sasaran 2: Terwujudnya Ketahanan Pangan

Tolok ukur capaian sasaran “**Terwujudnya Ketahanan Pangan**” diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	% AKG X Bobot

Kinerja sasaran “**Terwujudnya Ketahanan Pangan**” dihitung menggunakan data dari tabel konsumsi hasil SUSNAS BPS (tahun n-1) dengan menggunakan aplikasi penghitungan Skor PPH yang disediakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Berikut adalah capaian Skor PPH tahun 2021:

Tabel III.13. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi**	% Realisasi**		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,70	90,82	94,70	104,27 [(94,70/90,82) x 100%]	91,12	103,93 [(94,70/ 91,12) x 100%]

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan tercapai 94,70% melebihi target tahun 2021 dengan persentase capaian 104,27%.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu, capaiannya sama hanya komposisi pola konsumsi per kelompok pangan yang mengalami perubahan.

Tabel III.14. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2020 dan 2021**

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	
		2020	2021**
1.	Padi-padian	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	0,9	1,0
3.	Pangan Hewani	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,7	0,6
6.	Kacang-kacangan	6,6	6,6
7.	Gula	2,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	30,0	30,0
9.	Lain-lain	-	-
Total		94,7	94,7

*Keterangan: ** Angka Sangat Sementara*

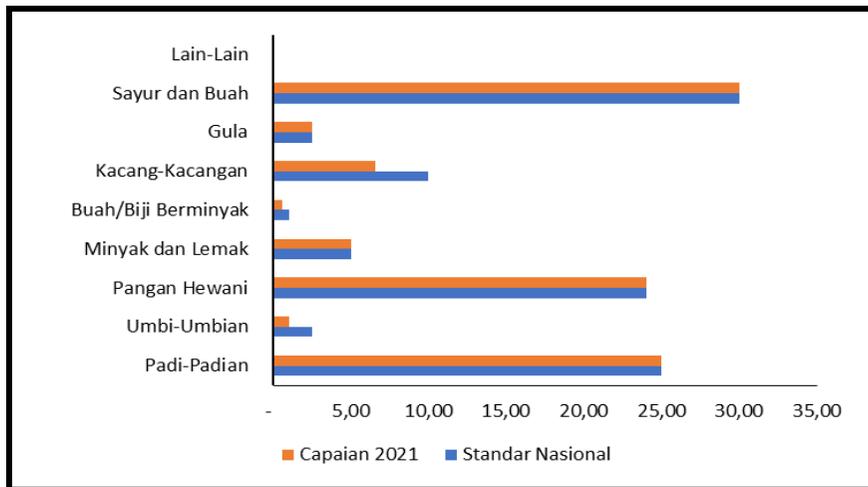
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 103,93%, dengan upaya yang berkesinambungan capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sampai akhir periode RPJMD.
- d. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran **“Terwujudnya Ketahanan Pangan”** didukung oleh:

Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik dengan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait. Sampai dengan tahun 2021, jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras telah mencapai 275,04 ton. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengadaan tiap tahunnya. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kerawanan maupun krisis pangan dan bencana. Distribusi dan akses pangan juga terus ditingkatkan. Harga pangan pokok di DIY relatif terkendali dengan adanya dukungan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Harga pokok dipantau secara rutin dan apabila diperlukan, dilakukan operasi pasar untuk pengendalian harga. Meningkatnya Skor PPH juga didukung dengan adanya gerakan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) serta usaha pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari).

Gambar III.1 Grafik Perbandingan Skor PPH Standar dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2021 (Angka Sangat Sementara)**



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Selain penganekaragaman konsumsi pangan, aspek keamanan pangan juga penting untuk diperhatikan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin meningkat, menunjukkan konsumsi masyarakat yang semakin beragam jenisnya dan semakin bergizi asupannya.

Dari data yang diolah menggunakan aplikasi dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Skor PPH DIY tahun 2021 sebesar 94,70% atau tercapai 104,27% dari target tahun 2021 yaitu 90,82%. Skor capaian PPH DIY lebih tinggi dibandingkan capaian skor PPH Nasional Tahun 2021 sebesar 86,3%. Terlihat dari Grafik III.2 diketahui bahwa Skor PPH untuk kacang-kacangan, biji-bijian dan umbi-umbian lebih rendah dari standar nasional dikarenakan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah lebih mengutamakan kecukupan pangan pokok sehingga konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) belum menjadi perhatian. Ke depannya masyarakat masih perlu didorong untuk meningkatkan konsumsi beberapa

golongan pangan alternatif yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan karena tingkat konsumsinya masih di bawah standar yang dianjurkan.

Tabel III.15. Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2021

No.	Indikator Program	Kinerja		
		Target	Realisasi**	% Realisasi
1	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Konsumsi Energi	0,08	-1,17	-1.462,5

Indikator Peningkatan Ketersediaan dan Konsumsi Energi dihitung dari rata-rata peningkatan angka ketersediaan energi dan peningkatan angka konsumsi energi antara tahun 2021 dengan tahun 2020. Angka ketersediaan energi diperoleh dari Neraca Bahan Makanan yang disusun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bersama dengan beberapa instansi terkait sebagai penyedia data untuk penghitungan, sedangkan angka konsumsi energi merupakan *output* lain yang dihasilkan pada saat penghitungan Skor PPH menggunakan data SUSENAS BPS. Capaian angka ketersediaan energi tahun ini sebesar 3.735 kkal/kap/hari atau naik 1 kkal/kap/hari dibanding capaian tahun sebelumnya 3.734 kkal/kap/hari. Capaian angka konsumsi energi tahun ini sebesar 2.147 kkal/kap/hari atau turun 52,5 kkal/kap/hari dibanding capaian tahun sebelumnya 2.199 kkal/kap/hari. Jika dirata-rata maka capaian kinerja peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi menjadi -1,17%. Capaian ini diperoleh dari total persentase peningkatan angka ketersediaan energi dan konsumsi energi di tahun 2021 sebesar $(0,03\% + (-2,36\%))/2$ yaitu sebesar -1,17%.

Dibandingkan standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018, tingkat konsumsi energi DIY sudah di atas standar rata-rata (2.100 kkal/kapita/hari). Terjadinya penurunan konsumsi energi tidak selalu berimplikasi negatif, penurunan konsumsi energi saat ini cukup baik karena semakin mendekati standar rata-rata konsumsi ideal sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Jika di atas angka standar dapat memicu timbulnya penyakit degeneratif. Penurunan konsumsi energi diantaranya terjadi pada kelompok padi-padian dan gula. Hal ini sesuai dengan tujuan program pemerintah terkait

diversifikasi/penganekaragaman pangan lokal yang bersumber dari bahan non padi-padian.

Keberhasilan pencapaian sasaran **“Terwujudnya Ketahanan Pangan”** didukung dari terselenggaranya 3 sub sistem ketahanan pangan yaitu: 1). ketersediaan, dimana capaian angka ketersediaan energi tahun 2021 sebesar 3.735 kkal/kap/hari yang melebihi standar anjuran Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2.400 kkal/kap/hari, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 275,04 ton; 2). keterjangkauan/distribusi, dengan terjaganya stabilisasi harga pangan pokok strategis melalui fasilitasi untuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Pasar Mitra Tani (PMT); dan 3). konsumsi serta keamanan pangan, terlaksana melalui gerakan penganekaragaman pangan, konsumsi pangan lokal, Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dan sertifikasi/registrasi PSAT.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA.
- b. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari).
- c. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai.
- d. Aspek distribusi dan akses pangan yang terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Pasar Mitra Tani (PMT). Dalam masa pandemi sampai saat ini PMT melakukan kerjasama dengan *market place online* seperti Aplikasi PAS TANI, *Grab Mart*, *Go Food/Go Shop* dengan memberikan ongkos kirim murah/potongan harga ongkos kirim jika belanja di PMT.

3.1.3. Sasaran 3: Pemenuhan Pangan Masyarakat

Tolok ukur capaian sasaran **“Pemenuhan Pangan Masyarakat”** diukur dengan indikator Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk

Makanan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator, dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 16. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Pemenuhan Pangan Masyarakat	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dibagi pengeluaran rata-rata perkapita sebulan total dikali 100% (Data BPS)

Capaian persentase pengeluaran rata-rata per kapita per bulan untuk makanan belum dirilis BPS, sehingga angka capaian menggunakan angka prediksi OPD dari hasil regresi linier terhadap data beberapa tahun sebelumnya. Data disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.17. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi**	% Realisasi**		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	41,03	39,19	40,83*	95,82 [(39,19-(40,83-39,19))/39,19 x 100%]	38,65	94,36 [(38,65-(40,83-38,65))/38,65 x 100%]

Keterangan: * Angka Prediksi

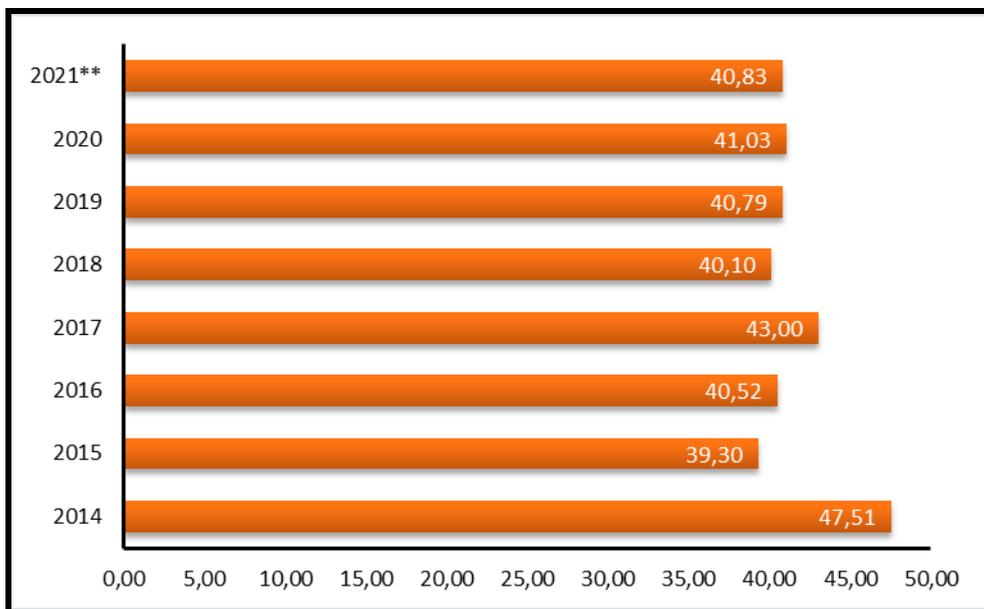
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran “**Pemenuhan Pangan Masyarakat**” adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tercapai 40,83%, persentase capaian 95,82% dari target 2021.

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu mengalami penurunan sebesar 0,2%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 94,36%, diproyeksikan indikator kinerja sasaran ini akan berhasil tercapai di akhir periode RPJMD.
- d. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 didukung oleh upaya penanganan kerawanan pangan dan penurunan kemiskinan di DIY yang terus dilaksanakan secara lintas sektor dengan optimalisasi program kegiatan dari dana APBD (Reguler maupun Dana Keistimewaan) dan APBN.

Gambar III.2. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan Tahun 2014-2021 (Angka Sangat Sementara)**



Sumber: BPS DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2022

Melihat *trend* capaian persentase pengeluaran rata-rata per kapita per bulan untuk makanan dalam periode 8 tahun ke belakang cukup fluktuatif, antar tahun ada yang mengalami kenaikan ada pula yang menurun. Namun jika dihitung menggunakan metode regresi linier dengan asumsi *ceteris paribus*, mengalami penurunan sebesar 0,2% dari tahun 2020, angka perkiraan tahun 2021 sebesar 40,83%.

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan adalah persentase pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding dengan semua pengeluaran untuk membeli

makanan dan non makanan. Pengeluaran per kapita untuk makanan sering dijadikan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Pengeluaran per kapita untuk makanan erat kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh dalam suatu rumah tangga. Suatu rumah tangga diindikasikan berpenghasilan rendah apabila pengeluaran rumah tangga untuk makanan terhadap total pengeluaran lebih besar daripada pengeluaran rumah tangga untuk non makanan terhadap total pengeluaran. Pendapatan yang diperoleh rumah tangga mencerminkan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga tersebut. Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan merupakan indikator kinerja kedua untuk urusan pangan. Data capaian tahun 2021 belum dirilis oleh BPS sehingga capaiannya menggunakan angka prediksi.

Kondisi ekonomi yang melemah di masa pandemi ini berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Jika ditinjau dari teori di Hukum Engel apabila pendapatan masyarakat menurun maka pengeluaran untuk makanan akan meningkat. Capaian tahun 2021 diprediksi lebih baik dibanding tahun 2020 karena kondisi perekonomian yang sudah membaik. Capaiannya diprediksi sebesar 40,83%. Angka ini lebih rendah dari tahun 2020, yakni sebesar 41,03%. Menurut teori yang ada, hal ini cukup baik karena semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan mengindikasikan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Pengeluaran untuk beberapa kelompok makanan mengalami penurunan, namun di sisi lain pengeluaran untuk rokok masih cukup tinggi. Data hasil survei BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa rokok bagi masyarakat miskin menjadi pengeluaran terbesar kedua di bawah beras. Pengeluaran untuk membeli rokok lebih tinggi dibandingkan untuk protein seperti telur, tempe atau ikan sehingga walaupun capaian kinerja tahun 2021 sudah lebih baik namun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 39,19%.

Selain meningkatkan perekonomian masyarakat, edukasi tentang pola konsumsi yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan mengoptimalkan diversifikasi pangan utamanya pangan lokal menjadi cara menurunkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk belanja bahan makanan. Hal ini perlu didukung dengan berbagai upaya lintas sektor

dalam rangka mengurangi konsumsi rokok, utamanya yang menasar pada generasi muda.

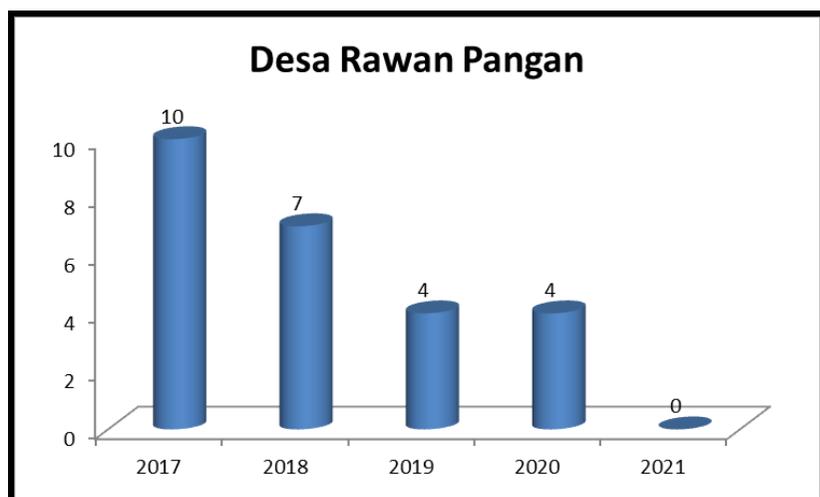
Tercapainya sasaran didukung oleh capaian program pada sasaran ini yakni:

Tabel III.18. Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2021

No.	Indikator Program	Kinerja		
		Target	Realisasi**	% Realisasi
1	Jumlah Desa Rawan Pangan	2	0	200

Tahun 2021, DIY sudah bebas dari Desa Rawan Pangan. Target akhir RPJMD tahun 2022 sudah tercapai namun berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan masih perlu dilakukan mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab utama kerawanan pangan di DIY. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dilaksanakan antara lain melalui Program Desa Mandiri Pangan (Demapan), Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), dan Pengembangan Korporasi Usahatani, Pertanian Keluarga, dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Gambar III.3. Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Kondisi ekonomi yang melemah di masa pandemi yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi pola pengeluaran konsumsi masyarakat.
- b. Tingkat konsumsi rokok cenderung meningkat selama masa pandemi ini (rokok juga masuk dalam golongan pengeluaran untuk makanan). Berdasarkan survei BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa rokok menjadi pengeluaran terbesar kedua di bawah beras bagi masyarakat miskin.

3.1 Capaian Kinerja Lainnya

Sebelum pandemi Covid-19, beberapa indikator menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan belum berada pada jalur yang tepat. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung menyebabkan upaya untuk mencapai target agenda SDG's 2030 menjadi semakin berat. SDG's merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No One Left Behind*".

Tujuh tahun perjalanan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seharusnya telah memberikan pencapaian yang dapat dijadikan modal untuk menghadapi berbagai macam krisis. Namun, krisis di berbagai bidang sebagai dampak dari pandemi Covid-19 nampaknya masih belum dapat teratasi. Upaya untuk mengatasi penyebaran Covid-19 belum dapat dilakukan secara tuntas dan diperkirakan akan terus berlangsung.

Wujud komitmen tertinggi Indonesia dalam pelaksanaan SDG's adalah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia segera menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) lima tahunan dan pemerintah daerah

menjabarkannya dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD). Secara berkala, pemerintah juga akan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk melihat kemajuan capaian sasaran SDG's.

Tabel III.19. Capaian Indikator yang Mendukung Sustainable Development Goals (SDG's)

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI CAPAIAN			
			2018	2019	2020	2021**
<i>Tabel 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</i>						
2.2.6	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	12,30	12,00	12,50	12,50
2.2.9	Skor pola pangan harapan (PPH)	%	89,92	94,70	94,70	94,70
2.2.10	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	7,00	4,00	4,00	-
<i>Tabel 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.</i>						
2.3.1	Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)*	Ha	104.905,76*	104.905,76*	104.905,76*	104.905,76*
2.3.2	Produksi tanaman pangan	Ton	2.210.046,00	2.044.938,00	2.377.185,00	2.314.312,00
2.3.3	Produksi hortikultura	Ton	396.406,00	398.500,00	411.340,00	402.259,00
2.3.4	Populasi ternak	Animal Unit	569.843,00	581.371,00	605.946,00	603.278,00
2.3.5	Produksi perkebunan	Ton	66.507,50	62.537,59	64.668,92	69.181,13

Sumber:

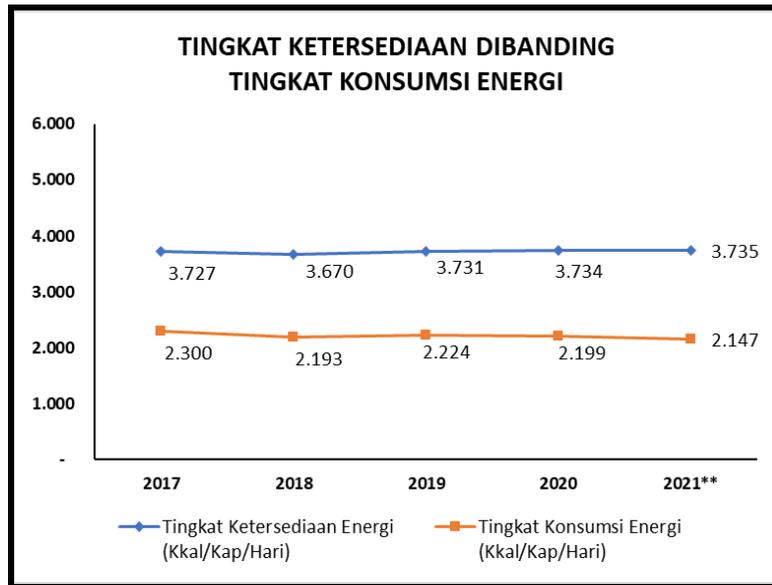
*) Berdasarkan pada:

1. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019
2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Di Indonesia, implementasi tujuan dan target SDG's dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY turut mendukung **Pilar Pembangunan Sosial**

untuk mencapai “Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan”.

Gambar III.4. Tingkat Ketersediaan dan Tingkat Konsumsi Energi Rata-Rata Per Kapita per Hari Tahun 2017-2021** (Angka Sangat Sementara)



**) Angka Sementara

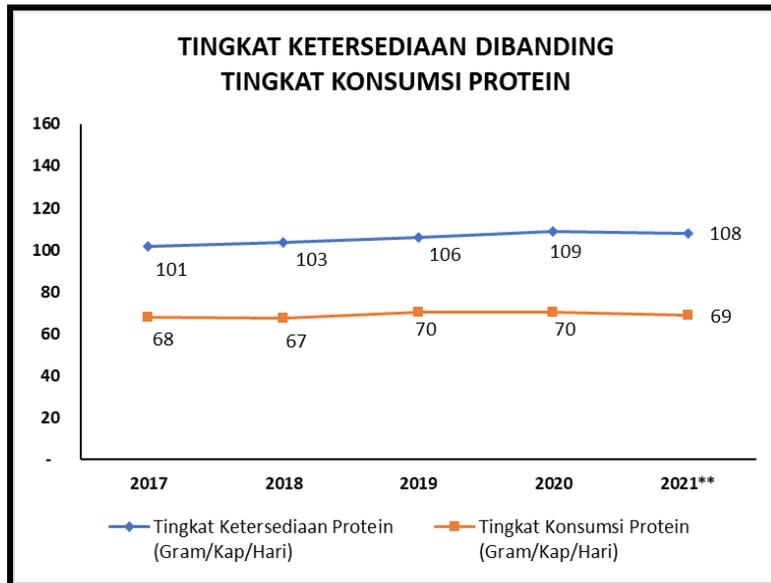
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2022

Berdasarkan informasi Program Pangan Dunia, penyebab utama kelaparan adalah konflik antar manusia, perubahan iklim, dan memburuknya perekonomian. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 diperkirakan akan mengakibatkan jumlah penduduk yang menderita kelaparan meningkat dua kali lipat dari sebelumnya (PBB, 2020).

Berdasarkan grafik diketahui bahwa konsumsi energi pangan per hari rata-rata penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 tercatat sebesar 2.147 kkal/kapita/hari dan konsumsi protein per hari rata-rata sebesar 69 gram/kapita/hari. Terlihat dalam grafik bahwa tingkat ketersediaan energi pangan dan protein masih mencukupi untuk konsumsi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, baik konsumsi kalori maupun protein penduduk DIY pada tahun 2021 tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar yang ditentukan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018, tingkat

konsumsi energi sebanyak 2.100 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebanyak 57 gram/kapita/hari.

Gambar III.5. Tingkat Ketersediaan dan Tingkat Konsumsi Protein Rata-Rata Per Kapita per Hari Tahun 2017-2021 (Angka Sangat Sementara)**



***) Angka Sementara*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2022

Capaian konsumsi ikan berdasarkan data SUSENAS BPS pada tahun 2020 dan 2021 adalah sama, sebesar 12,5 kg/kapita/tahun. Ke depan, DPKP DIY akan terus berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) DIY dalam rangka peningkatan ketersediaan sumber protein hewani khususnya ikan dan penganekaragaman konsumsi pangan utamanya melalui Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan oleh Dislautkan.

Dalam mewujudkan pertanian dan pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah menginisiasi *review* terhadap Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Pertanian Berkelanjutan sampai terbit Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini diusulkan untuk mengakomodasi adanya perubahan kebijakan dalam perlindungan lahan

pertanian berkelanjutan. Perubahan kebijakan ini antara lain, adanya perubahan materi yang diundangkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039, sehingga perlu penyesuaian kebijakan dalam perencanaan dan penetapan lahan pertanian berkelanjutan. Penyesuaian yang dimaksud ialah terhadap Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) semula memiliki luas 35.911,59 Ha telah berubah menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 104.905,76 Ha sesuai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ini terdiri dari lahan inti seluas 72.409,79 Ha dan lahan cadangan 32.495,97 Ha.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini untuk mewujudkan perlindungan dan terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Perubahan ini juga untuk meningkatkan peran serta pemerintah dan pemangku kepentingan terkait terhadap pelaksanaan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan.

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi**	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	Juta Rupiah	7.255.205	7.496.829	103,33	34.070.663.450	29.710.059.807	87,20	4.360.603.643
2	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,82	94,7	104,27	1.173.386.750	1.163.864.000	99,19	9.522.750
3	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	39,19	40,83	95,82	497.747.500	490.387.000	98,52	-
Jumlah yang Terkait Langsung Capaian Sasaran							35.741.797.700	31.364.310.807	87,75	4.370.126.393
Program pendukung							49.253.612.104	47.211.022.489	95,85	2.042.589.615
Total Belanja							84.995.409.804	78.575.333.296	92,45	6.412.716.008

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Berdasarkan Tabel III.20 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melampaui target kinerja tahun 2021 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 31.364.310.807,00, atau terealisasi 87,75% dari target sebesar Rp. 35.741.797.700,00 dan terdapat efisiensi anggaran Rp. 4.370.126.393,00. Program pendukung terealisasi Rp. 47.211.022.489,00 atau terealisasi sebesar 95,85% dari target Rp. 49.253.612.104,00. Efisiensi anggaran bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas, belanja operasional kendaraan dinas, belanja listrik, *telephone*, dan air.
- Efisiensi belanja honorarium pembicara, narasumber, moderator serta efisiensi gaji dan tunjangan pegawai didasarkan pada kesesuaian perubahan jumlah SDM yang ada.

3.3 Inovasi

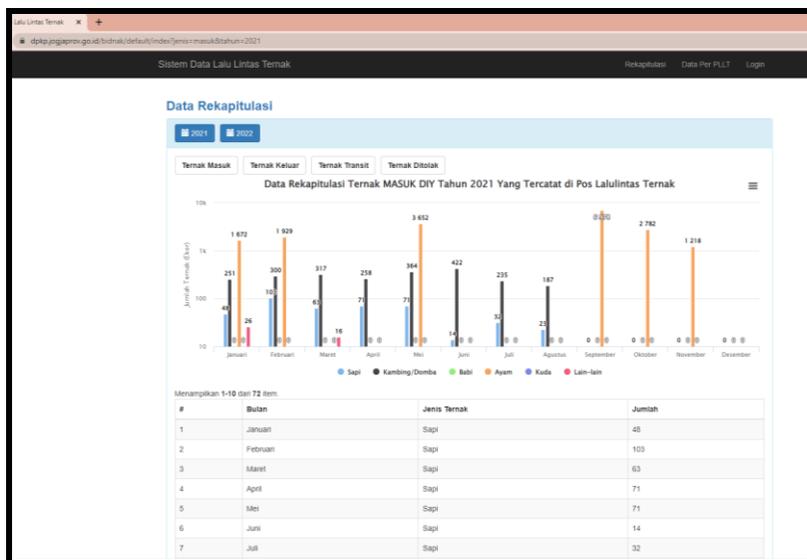
Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. Sistem Data Lalu Lintas Ternak

Sebuah sub aplikasi (modul) yang menempel pada aplikasi *website* Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang digunakan untuk monitoring data rekapitulasi lalu lintas ternak baik masuk, keluar, transit maupun ditolak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang disajikan adalah data bulanan selama satu tahun untuk tiap jenis ternak yang dicatat, sedangkan untuk format datanya berupa grafik dan tabel data. Data-data tersebut diinput secara berkala oleh petugas yang ditunjuk pada masing-masing Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelumnya laporan disampaikan secara manual dan dikumpulkan per bulan, dan direkapitulasi oleh petugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Setelah adanya sistem ini, laporan Petugas PLLT menjadi lebih cepat dan langsung terekap otomatis. Adapun *link* sistem ini yaitu www.dpkp.jogjaprovo.go.id/bidnak.

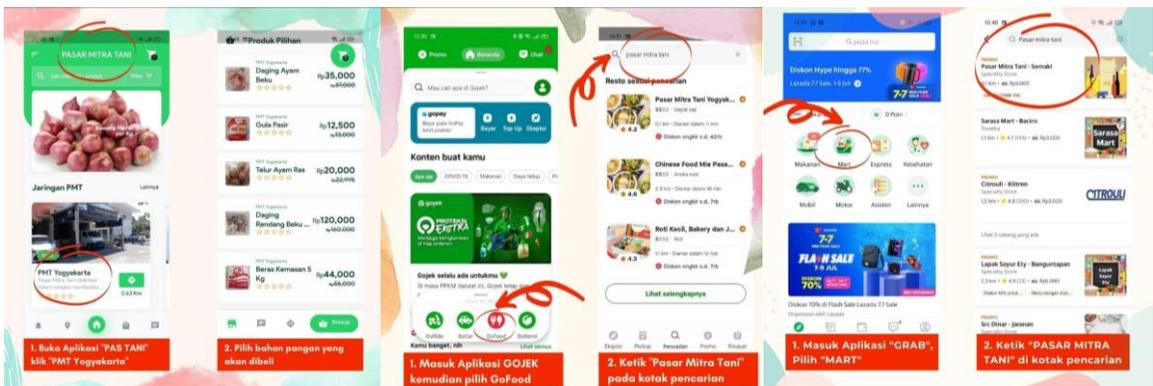
Gambar III.6. Tampilan Sistem Data Lalu Lintas Ternak



b. Pasar Mitra Tani via *Online Shopping* (Aplikasi PAS TANI, *Grab Mart*, *Go Food*)

Digitalisasi sektor pertanian dan pangan telah ditegaskan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam berbagai kesempatan. Menurut Mentan, penggunaan *digital* dan *online system* menjadi tuntutan di tengah pembatasan mobilisasi akibat pandemi. PAS TANI menjadi salah satu terobosan pemasaran digital untuk memudahkan masyarakat dalam berbelanja di Pasar Mitra Tani. PAS TANI merupakan aplikasi belanja daring yang menyediakan berbagai bahan pangan dengan harga terjangkau dan berkualitas. Digitalisasi menjadi bagian penting dari distribusi pangan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini membentuk cara berfikir baru masyarakat dengan ditunjukkan oleh peningkatan minat pasar *online*. Selain PAS TANI, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY juga melakukan terobosan dengan menjalin kerjasama dengan GRAB dan GOJEK dalam proses pemasaran produk Pasar Mitra Tani melalui menu *Grab Mart* dan *Go Food*.

Gambar III.7. Tampilan Sistem Pesan Antar Pasar Mitra Tani Yogyakarta di Aplikasi PAS TANI, *Grab Mart*, dan *Go Food*

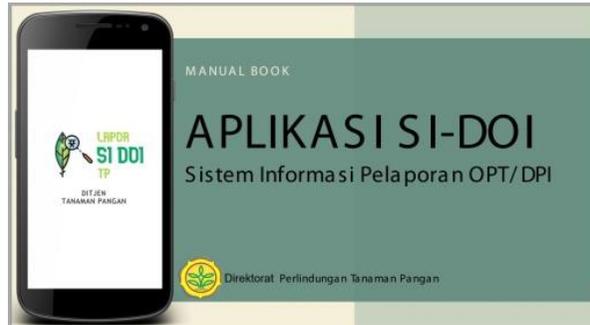


c. Sistem Informasi Pelaporan Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim (SI-DOI)

SI-DOI, merupakan aplikasi berbasis online yang digunakan untuk pelaporan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) khususnya untuk komoditas Tanaman Pangan yang meliputi laporan OPT, banjir, kekeringan, bencana alam dan gangguan fisiologis. Sebelumnya, laporan OPT/DPI disampaikan secara manual oleh Petugas POPT namun setelah adanya aplikasi SI-DOI pelaporan jauh lebih cepat, akurat dan *real time* karena dapat langsung diakses melalui

aplikasi. Adapun *link* aplikasi dapat diunduh di <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pertanian.sidoi>.

Gambar III.8. Tampilan *Interface* Aplikasi Informasi Pelaporan Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim (SI-DOI)



d. Bank Pakan *Complete Feed*

Pakan *Complete Feed* adalah campuran berbagai bahan pakan menjadi ransum untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik pada hewan ternak sehingga meningkatkan konsumsi nutrisi dan efisiensi waktu penyiapan dan penyimpanan pakan. Pakan *complete feed* diformulasikan sehingga kandungan nutrisi sesuai tujuan pemeliharaan. Bentuk pakan ternak yang akan disimpan di dalam Bank Pakan dapat berupa pakan yang dikeringkan, silase, atau bahkan hasil dari fermentasi sehingga kebutuhan pakan ternak dapat terpenuhi setiap saat. *Complete feed* dibuat secara teratur lalu disimpan dalam keadaan *anaerob*, sehingga ketika terjadi kekurangan pakan dapat digunakan untuk pakan sapi, domba, dan kambing.

Gambar III.9. Bank Pakan *Complete Feed*



3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada Gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada Gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak pandemi COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.21. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	URUSAN PANGAN	A. OPD:		1. Perumusan kebijakan data harga, pasokan, dan akses pangan; data ketersediaan dan kebutuhan pangan yang disampaikan secara rutin ke Tim Pengendali Inflasi Daerah, Satgas Pangan, BIN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi bahan perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan.	Tim Pengendali Inflasi Daerah, Satgas Pangan, BIN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan sasaran 1: meningkatnya derajat kualitas SDM melalui pelaksanaan kebijakan pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi yang dilaksanakan melalui Program Pemda Peningkatan Usia Harapan Hidup
		1. Dinas kelautan dan Perikanan	Mengampu produksi perikanan			
		2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mengampu produksi kehutanan			
		3. Dinas Perindustrian Perdagangan DIY	Menyediakan data ketersediaan pangan dan dalam rangka promosi keamanan pangan pada sektor industri dan perdagangan			
		4. Dinas PUP ESDM	Menyediakan sarana infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi pangan ke seluruh wilayah DIY			
5. Dinas Perhubungan DIY	Mendukung kelancaran distribusi bahan pangan ke seluruh wilayah DIY					

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	Sosialisasi dan gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan sesuai kaidah B2SA dan pelaksanaan kantin sehat dengan sasaran anak sekolah			<p>2. Mendukung pencapaian sasaran strategis terwujudnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang didukung oleh keberhasilan 3 sub sistem ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan/distribusi pangan, dan pemanfaatan/konsumsi pangan.</p> <p>3. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</p> <p>4. Mendukung pencapaian kinerja</p>
		7. Dinas Pariwisata DIY	Dalam rangka koordinasi dengan Hotel Restoran dan Kafe (Horeka) dalam mendorong penyediaan pangan sesuai kaidah B2SA dengan mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal			
		8. Dinas Koperasi dan UKM	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi bagi UKM maupun koperasi pengolah pangan			
		9. Dinas Kebudayaan DIY	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Lumbung Mataraman melalui Dana Keistimewaan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		10. Satpol PP DIY	Penegakan Perda dan Pergub keamanan pangan			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		<u>B. INSTANSI LAIN:</u>				5. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengawasan Keamanan Pangan
		1. Perum Bulog Kanwil Yogyakarta	Pengelolaan stok pangan di tingkat Provinsi			
		2. Balai Besar POM DIY	Registrasi mutu dan keamanan pangan olahan serta pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan			<u>Bagi Kelompok Sasaran:</u>
		3. LPPOM MUI	Sertifikasi produk Halal			1. Menjadi bahan perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan
		4. Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Menjamin keamanan pangan yang masuk ke DIY melalui mekanisme ekspor-impor			2. Informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, anggaran, dan penentuan sasaran dalam menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan/distribusi pangan, dan pemanfaatan/konsumsi pangan masyarakat
		5. BPTP Yogyakarta	Diseminasi teknologi pangan			
		6. BPS DIY	Menyediakan data SUSENAS sebagai data sekunder yang digunakan untuk menghitung Skor PPH			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		<p><u>C. DUNIA USAHA:</u></p> <p>1. Gapoktan se-DIY 2. Pelaku usaha pangan olahan 3. PHRI/Grup Accor</p>	<p>Penyedia bahan pangan pokok yang diproduksi oleh petani/kelompok tani yang menjadi anggotanya yang selanjutnya disalurkan ke Toko Tani Indonesia untuk dijual ke konsumen dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar</p>			
		<p><u>D. PT:</u></p> <p>1. PT. Tarumartani</p>	<p>Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</p>			
		<p>2. PT. Go-Jek Indonesia 3. PT. Grab Indonesia</p>	<p>Hal pemasaran produk-produk TTIC/Pasar Mitra Tani secara <i>daring</i></p>			
		<p><u>E. AKADEMISI:</u></p> <p>1. Fakultas Teknologi Pertanian UGM</p>	<p>Diseminasi teknologi pangan</p>			
		<p><u>F. MASYARAKAT:</u></p> <p>1. PKK DIY 2. Guru PAUD/SD</p>	<p>Pelaksanaan sosialisasi dan gerakan penganekaragaman</p>			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
			konsumsi pangan sesuai kaidah Beragam Bergizi Seimbang dan Aman			
		2. Lembaga Konsumen Yogyakarta	Dalam rangka perlindungan konsumen			
		A. OPD: 1. Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY beserta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten/kota se-DIY	Penyedia data sekunder yang digunakan dalam analisis dan penentuan desa/kecamatan yang masuk kriteria rawan pangan dalam peta SKPG dan FSVA	2. Penyusunan peta FSVA dengan tujuan menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat Provinsi dan Kabupaten.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan sasaran 2: meningkatnya derajat ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah
		2. Dinas Sosial DIY	Dalam rangka penjaminan hidup masyarakat miskin di Desa Rawan Pangan	3. Peta daerah rawan pangan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerawanan masing-masing		

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		3. Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Rawan Pangan sesuai potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut	desa yang ditinjau dari tiga aspek, yaitu: Aspek Ketersediaan Pangan, Aspek Akses Pangan, dan Aspek Pemanfaatan Pangan. Peta daerah rawan pangan merupakan gabungan antara tiga peta, yaitu: peta ketersediaan pangan, peta akses pangan, dan peta aspek pemanfaatan pangan.		<p>tangga miskin melalui Program Pemda Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>2. Mendukung pencapaian sasaran strategis pemenuhan pangan masyarakat dengan indikator Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan</p> <p>3. Mendukung pencapaian kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>1. Menjadi bahan perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan</p> <p>2. Informasi bagi pengambil keputusan</p>
	4. Dinas PUP ESDM	Dalam rangka pemenuhan infrastruktur untuk menunjang hidup yang layak bagi masyarakat miskin di Desa Rawan Pangan				
	<u>B. INSTANSI LAIN:</u>					
		1. BKKBN DIY dan BPS DIY	Penyedia data sekunder yang digunakan dalam analisis dan penentuan desa/kecamatan yang masuk kriteria rawan pangan dalam peta SKPG dan FSVA			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		<u>C. AKADEMISI:</u> 1. Universitas Negeri dan Swasta di DIY melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat	Pendampingan dan pemberdayaan di Desa Rawan Pangan			dalam perencanaan program, penentuan sasaran serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat Provinsi dan Kabupaten
		<u>D. MASYARAKAT:</u> 1. PKK DIY	Pelaksanaan sosialisasi dan gerakan Desa Mandiri Pangan (demapan), LAPM (Lembaga Akses Pangan Masyarakat), PK (Pertanian Keluarga) dengan lokasi di daerah rawan pangan			
2.	URUSAN PERTANIAN	<u>A. OPD:</u> 1. Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY	Pengaruh kebijakan di sektor pertanian	1. Penyusunan peta LP2B di tingkat Kabupaten/Kota (dengan dukungan dana APBN) yang akan menjadi bahan perumusan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di DIY 2. Pembentukan Forum Komunikasi Petani Milenial yang menjadi wadah bagi tumbuh dan berkembangnya para petani muda dalam upaya regenerasi petani	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dicapai melalui strategi mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	Pengawasan dan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	3. Penyediaan data serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) secara <i>real time</i> untuk merumuskan kebijakan pengendalian yang tepat		<p>dilaksanakan melalui Program Pemda Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa)</p> <p>2. Mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan populasi peternakan dengan indikator kinerja nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)</p> <p>3. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyediaan dan</p>
	3. Dinas PUP ESDM	Penyediaan prasarana pertanian khususnya jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya				
	4. Dinas Kebudayaan DIY	Fasilitasi kegiatan budaya pertanian berbasis budaya melalui kegiatan Dana Keistimewaan				

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY	Pendampingan dan pembinaan industri olahan produk pertanian, penguatan kelembagaan UKM maupun koperasi tani, dan pengawalan dan pengawasan terhadap peredaran dan distribusi pupuk subsidi di DIY			Pengembangan Sarana Pertanian 4. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyuluhan Pertanian
		6. Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota	Menumbuhkan dan mengembangkan agrowisata-agrowisata di DIY, antara lain agrowisata Durian di Patuk, Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		7. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	Fasilitasi kelancaran kerjasama <i>sister province</i> dengan <i>Prefektur Yamanashi</i> (Jepang) dalam rangka mengembangkan tanaman Stroberi guna meningkatkan pendapatan petani dan mendukung agrowisata di Cangkringan, Sleman serta dengan provinsi <i>Gyongsang-bukdo</i> (Korsel) dalam rangka pengembangan jamur di Bleberan, Gunungkidul			
		<u>B. INSTANSI LAIN:</u> 1. BPTP DIY	Diseminasi teknologi pertanian, bersama dengan DPKP melakukan bimtek/pelatihan dan pendampingan bagi para petani/pekebun/			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Menjadi bahan perumusan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
			peternak dalam rangka budidaya <i>on farm</i> maupun <i>pasca</i> panen sampai dengan pengolahan produk pertanian sehingga memiliki nilai tambah			2. Upaya bersama pengawasan dan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
		2. Balai Besar Veteriner	Pengamatan dan pengidentifikasian diagnosis pengujian <i>veteriner</i> dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan dan pengujian <i>veteriner</i>			3. Mendukung berkembangnya para petani muda dalam upaya regenerasi petani
		3. Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Pengawasan keluar masuk produk pertanian melalui mekanisme ekspor-impor, mengawal ekspor salak ke Kamboja dan China			3. Menjadi bahan kebijakan pengendalian serangan OPT/DPI tepat
		4. Polbangtan Yogyakarta Magelang	Pengembangan SDM pertanian, termasuk pengembangan petani milenial			4. Upaya mitigasi bencana akibat Dampak Perubahan Iklim sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		5. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Balai Besar Penelitian Jagung dan Serealia Lain, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan hijauan Pakan ternak, Balai Penelitian Tanaman Buah, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Balai Penelitian tanaman Hias, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Balai Besar Pasca Panen pertanian	Penyediaan benih/bibit pertanian berkualitas serta diseminasi teknologi pertanian			
		6. Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Kerjasama Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) lintas perbatasan DIY-Jawa Tengah, magang industri bagi mahasiswa di Laboratorium Pengujian Mutu Produk Pertanian (LPMPP), dan kerjasama Pengendalian Tikus Terpadu berbasis Lanskap			
		7. Bank Indonesia, Kementerian Kominfo RI, Bappeda Sleman, Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Bagian	Fasilitasi dalam operasionalisasi pasar lelang cabai dan sayuran secara <i>online</i> di Kabupaten Sleman			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Perekonomian Setda Kabupaten Sleman, Bank BRI				
		8. BMKG	Informasi prakiraan cuaca dan iklim, informasi ini sangat penting dalam rangka menyusun antisipasi terhadap serangan OPT maupun terjadinya banjir/kekeringan. BMKG juga memberikan dukungan melalui kegiatan Sekolah Lapang Perubahan Iklim bagi para petani			
		9. TNI dan POLRI	Mitra kerja dan bersinergi mendukung ketahanan pangan dengan turut serta mengawal pengamanan produksi pertanian diantaranya pengamanan dari gangguan OPT			
		10. BPS DIY, BPS Kabupaten/Kota se-DIY	Penyedia data statistik pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		11. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten/Kota se-DIY	Mitra kerja dalam pembinaan, pendampingan dan fasilitasi bagi poktan/KWT/gapoktan di wilayah masing-masing, penyedia data statistik pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)			
		<u>C. DUNIA USAHA:</u> 1. Produsen sarana dan prasarana pertanian	Menyediakan bahan-bahan (benih/bibit,pupuk, pakan, bahan pengendali OPT, obat hewan, alat mesin pertanian, alat/mesin pengolahan, dan sarana produksi lainnya) yang akan disalurkan sebagai fasilitasi kepada poktan/KWT/gapoktan			
		<u>D. PT:</u> 1. PT. Jasindo	Penyelenggaraan asuransi tani (AUTP dan AUTS)			
		2. PT. Pupuk Indonesia	Berkoordinasi dengan Bidang Tanaman Pangan untuk pelaporan pendistribusian pupuk subsidi di kios-kios pupuk di			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
			DIY			
		3. Bank Pemerintah yang tergabung dalam HIMBARA	Penyedia jasa Kredit Usaha Rakyat (KUR)			
		4. BRI	Bersama dengan Bidang Tanaman Pangan melakukan pengawalan terhadap penggunaan Kartu Tani untuk menebus pupuk bersubsidi			
		5. BPD DIY	Bersama dengan Bidang Hortikultura melaksanakan fasilitasi gudang benih bawang merah dan demplot benih bawang merah guna mencapai mandiri benih bawang merah di Kabupaten Bantul			
		<u>E. AKADEMISI:</u>				
		1. Beberapa Universitas Negeri dan Swasta di DIY yang memiliki Fakultas Pertanian, Teknologi Pertanian, dan/atau Peternakan	Diseminasi teknologi dan pemberdayaan poktan/KWT/gapoktan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		F. MASYARAKAT:				
		1. Tim Penggerak PKK DIY	Peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan pekarangan keluarga			
		2. Poktan, Gapoktan, dan P3A di wilayah DIY	Mitra pengolahan produk pertanian			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY di antaranya:
 - a. Urusan Pertanian
 - Sebagian produk pertanian mengalami kesulitan pemasaran akibat permintaan pasar yang kurang stabil karena kondisi pandemi Covid-19.
 - Dampak pemanasan global yang memicu perubahan iklim.
 - Regenerasi petani masih sulit dilakukan.
 - Pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum optimal.
 - b. Urusan Pangan
 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) DIY telah menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat DIY saat ini sudah baik. Akan tetapi terdapat jenis pangan yang nilai konsumsinya melebihi nilai standar yaitu padi-padian dan terdapat jenis pangan yang nilai konsumsinya dibawah nilai standar yaitu umbi-umbian, buah biji berminyak serta kacang-kacangan.
 - Pelaksanaan perizinan berusaha melalui aplikasi terintegrasi secara elektronik *Online Single Submission* (OSS) sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membutuhkan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan penjamin mutu, dan ketersediaan sarana prasana yang memadai.

2. Adapun yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu:
 - a. Urusan Pertanian
 - Mendorong para petani dan pelaku usaha pertanian untuk mengoptimalkan pemasaran produknya secara daring antara lain dengan memanfaatkan keberadaan Pasar Mitra Tani (di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, *markethub* SIBAKUL yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY, maupun berbagai aplikasi pemasaran lain yang sudah ada.
 - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para petani dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
 - Membentuk dan memfasilitasi Forum Komunikasi Petani Milenial DIY.
 - Terbitnya: (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
 - b. Urusan Pangan
 - Meningkatkan promosi dan kampanye sumber pangan karbohidrat pangan lokal non beras sebagai sumber pangan alternatif serta edukasi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan menggunakan berbagai media, terutama media sosial yang banyak dan mudah diakses oleh masyarakat.
 - Sosialisasi perizinan berbasis OSS di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
3. Rencana tindak lanjut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ke depannya yaitu:
 - a. Urusan Pertanian
 - Optimasi pemasaran dengan media elektronik digital dan berbagai aplikasi pemasaran yang sudah ada serta diversifikasi pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang lebih tahan lama dengan kualitas yang baik.

- Memperbanyak sosialisasi dan pelatihan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim bagi petani.
- Menyelenggarakan berbagai pelatihan usaha tani dan manajerial pertanian terutama untuk komoditas-komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi dan mendorong digitalisasi pertanian dari hulu sampai dengan hilir.
- Sosialisasi Perda dan Pergub yang baru ke semua Kabupaten/Kota serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam rangka implementasi peraturan-peraturan tersebut.

b. Urusan Pangan

- Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan promosi B2SA melalui berbagai media.
- Penyiapan SDM yang kompeten untuk menangani OSS dan menempatkan personil tersebut secara permanen sebagai bagian pelaksana perizinan, menghimbau Kabupaten/Kota yang belum memiliki OKKP-D agar segera membentuk lembaga ini, dan melengkapi sarana prasarana penunjang layanan OSS agar dapat memenuhi tuntutan kecepatan dan ketepatan layanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Tumbuhnya perekonomian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY (Indikator: persentase peningkatan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 6,15%)	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	N/A	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757
2	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	N/A	90,22	90,52	90,82	91,12
3	(Indikator: persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 2,96%)	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)	Juta rupiah	7.255.205	Triwulan I	7.255.205
					Triwulan II	7.255.205
					Triwulan III	7.255.205
					Triwulan IV	7.255.205 *)
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,82	Triwulan I	90,82
					Triwulan II	90,82
					Triwulan III	90,82
					Triwulan IV	90,82
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	39,19	Triwulan I	39,19
					Triwulan II	39,19
					Triwulan III	39,19
					Triwulan IV	39,19 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (APBD)	Rp. 309.615.500
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBD)	Rp. 726.138.000
		Program Pengawasan Keamanan Pangan (APBD)	Rp. 137.633.250
2.	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan (APBD)	Rp. 497.747.500
3.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (APBD, DBH CHT)	Rp. 16.536.833.000
4.	Program Peningkatan Populasi Peternakan		
5.	Peningkatan Produksi Perkebunan		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
6.	Program Pengembangan Perbenihan Pertanian		
7.	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian		
8.	Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan		
9.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (APBD, DBH CHT)	Rp. 6.461.338.750
10.	Program Peningkatan Produksi Hortikultura		
11.	Peningkatan Produksi Perkebunan		
12.	Program Peningkatan Populasi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (APBD)	Rp. 843.563.000
13.	Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
14.	Program Perlindungan Tanaman Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (APBD)	Rp. 696.028.000
15.	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	Program Penyuluhan Pertanian (APBD)	Rp. 3.521.849.700
16.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 39.294.508.040
17.	Program Administrasi Perkantoran		
18.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		
19.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Jumlah Anggaran		Rp. 69.025.254.740

2. *) Data capaian kinerja bersumber dari BPS, Angka Sementara baru dirilis bulan Februari atau Maret tahun berikutnya sehingga capaian akhir tahun menggunakan Angka Prediksi OPD.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman Rp. 3.385.191.063.
4. Mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp. 453.255.000 melalui:
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp. 353.255.000.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Rp 100.000.000.
5. Pengelolaan dana APBN Dekonsentrasi sebesar Rp. 4.501.241.000 melalui program:
 - a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - c. Program Dukungan Manajemen
6. Pengelolaan dana APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp. 49.313.550.000 melalui program:
 - a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - c. Program Dukungan Manajemen

Yogyakarta, 4 November 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Hamengku

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN DIY



I. Sugeng Purwanto

I. SUGENG PURWANTO, M.M.A.
NIP. 19650525 199103 1 017

- 2) Kualitas Pengukuran;
- 3) Implementasi Pengukuran.
- c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi;
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
- d. Evaluasi Internal meliputi;
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi;
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (*IKU*)
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY memperoleh kategori A, nilai sebesar 84,93% dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel;
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,91 atau 89,70% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,08 atau 88,33% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,94 atau 86,25% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,0 atau 80,0% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 15,0 atau 75,0% dari bobot sebesar 20%.
5. Pengukuran kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 menggunakan pengukuran kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY beserta seluruh jajarannya agar bisa mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik dan terus berupaya meningkatkan kinerja, terutama tindakan perbaikan yaitu pada pencapaian sasaran/kinerja organisasi baik pada kinerja yang dilaporkan (*output*), (*outcome*) dan IKU.

Demikian. ...

Demikian laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP Tahun 2020 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

